

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 (2014) tentang pemerintahan daerah pada hakikatnya Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dengan dibantu oleh perangkat daerah. Urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah berasal dari kekuasaan pemerintahan yang ada ditangan Presiden. Konsekuensi dari negara kesatuan adalah tanggung jawab akhir pemerintahan ada ditangan Presiden. Agar pelaksanaan urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah berjalan sesuai dengan kebijakan nasional maka Presiden berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Optimasi keberhasilan suatu kegiatan sangat di pengaruhi oleh ketepatan pengorganisasian, system kerja yang di jalankan dan unsur-unsur pendukungnya yaitu mutu orang-orangnya serta sarana yang di perlukan .dalam keadaan demikian maka akan dapat di capai suatu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna dan berhasil meskipun sangat terbatas. Sejalan dengan itu maka dalam penyelenggaraan pembangunan desa diperlukan pengorganisasian yang mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa serta melaksanakan

administrasi pembangunan desa yang semakin rasional tidak di dasarkan pada tuntutan emosional yang sukar di pertanggung jawab kan pelaksanaanya.Pemerintah memiliki peran dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat sekitar,baik dari propinsi,kabupaten ataupun desa ,karena tidak mungkin bagi pemerinta untuk langsung turun tangan dalam pelayanan tersebut maka dari itu di perlukan instansi-instansi atau di bentuk pemerintahan kecil agar dapat melayani masyarakat secara keseluruhan .Salah satu dari pelayanan tersebut adalah desa,Desa adalah suatu organisasi pemerintah yang sangat kecil di Indonesia.Peraturan di Desa adalah hal yang wajib untuk di laksanakan selain itu peraturan Desa juga merupakan suatu kebutuhan yang di haruskan untuk memenuhi peraturan tersebut dalam menjalankan rumah tangga Desa agar memperoleh perkembangan menjadi lebih baik lagi. Selain itu desa juga merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang merupakan suatu wilayah administrative di Indonesia di bawah kecamatan.Banyak peraturan desa yang telah di keluarkan sebagai bentuk dalam kepengurusan pemerintah terhadap desa.pelayanan pemerintah kepada desa dalam bentuk peningkatan pembangunan desa yang merupakan tanggung jawab pemerintah .dengan adanya pembangunan tersebut pemerintah memberikan dana yang di sebut Alokasi Dana Desa (ADD) apresiasi pemerintah terhadap dana bantuan kepada desa dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD) yang di dapat dari dana APBD.Terselenggaranya pemerintahan yang baik menjadi persyaratan utama dalam mewujudkan aspirasi masyarakat didalam mencapai tujuan suatu Bangsa

dan Negara. Karenanya tidak berlebihan jika penyelenggaraan pemerintahan yang baik menjadi salah satu indikasi terwujudnya suatu demokratisasi sebagai upaya untuk mengembalikan kedaulatan kepada rakyat. Bentuk dari terselenggaranya pemerintahan yang baik yaitu salah satunya adalah bentuk akuntabilitas atau pertanggungjawaban pada masyarakat, penggunaan anggaran dan kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah. Suatu bentuk akuntabilitas atau pertanggungjawaban tidak hanya diterapkan pada pemerintah pusat dan daerah saja melainkan juga diterapkan sampai pada tingkat pedesaan. Pemberian otonomi daerah seluas-luasnya itu berarti bahwa pemberian kewenangan dan keleluasaan kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya daerah secara optimal. Meskipun titik berat otonomi diletakkan kepada tingkat Kabupaten/Kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan yang paling bawah yaitu desa. Pembangunan desa masih banyak bergantung dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan swadaya masyarakat yang jumlah maupun sifatnya tidak dapat diprediksi. Seperangkat aturan mengenai pemerintah desa dengan pertimbangan telah cukup untuk berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan serta bangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera, sehubungan dengan telah dilimpahkannya pengelolaan keuangan desa secara mandiri oleh desa yang selanjutnya disebut dengan Alokasi Dana Desa. Dalam pasal 1 angka 11 peraturan pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang desa disebutkan bahwa Alokasi Dana Desa adalah dana yang di alokasikan pemerintah

kabupaten atau kota untuk desa yang bersumber dari bagian dana pertimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota. Berdasarkan data APBDes jumlah dana Alokasi Dana Desa yang ada di desa olilit kecamatan tanimbar selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar yaitu sebesar Rp. 1.900.000.000,00. Dalam situasi pengelolaan Alokasi Dana Desa ini rawan terhadap penyelewengan oleh pihak yang seharusnya di percaya oleh masyarakat dalam membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang di sinilah pentingnya peran masyarakat sebagai pengawas langsung dan tidak lepas dari peran pemerintah kabupaten selaku pemberi dana untuk selalu memonitor jalannya pembangunan di Desa Olilit Kecamatan Tanimbar selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar.UU No 16 Tahun 2014 tentang desa di jelaskan bahwa sangat jelas mengatur tentang pemerintahan desa didalamnya terkandung tentang kewajiban pemerintah kabupaten untuk merumuskan dan membuat peraturan tentang Alokasi Dana Desa(ADD) sebagai bagian dari kewenangan fiscal desa untuk mengatur dan mengelola keuangan. Dalam hal mengelola Alokasi Dana Desa pemerinttah Desa Olilit masih belum memaksimalkan kinerjanya terutama di dalam perencanaan,pelaksanaan maupun pertanggung jawabannya.yang hingga saat ini belum ada kejelasan soal pertanggung jawanban mengenai Alokasi Dana Desa.

Berdasarkan ulasan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Keberhasilan Pembangunan Di Desa Olilit Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar”**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat di bentuk rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah ada pengaruh antara Perencanaan terhadap Keberhasilan Pembangunan
2. Apakah ada pengaruh antara Pelaksanaan terhadap Keberhasilan Pembangunan
3. Apakah ada pengaruh antara Pengawasan terhadap Keberhasilan Pembangunan
4. Apakah ada pengaruh antara Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan secara Simultan terhadap Keberhasilan Pembangunan

1.3. Tujuan Penelitian :

Untuk mengetahui bagaimana kinerja pemerintah desa padapengelolaan alokasi dana desa yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terkait Keberhasilan pembangunan di Desa Olilit Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

1.4. Manfaat Penelitian :

Adapun Manfaat yang di harapkan dari hasil penelitian ini secara praktis dan teoritis antara lain :

1. Manfaat Praktis :

Bagi Pemerintah Kabupaten atau Daerah agar dapat di gunakan sebagai bahan pertimbangan dan Evaluasi bagi Desa-desa yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar agar lebih meningkatkan kinerjanya yang berkaitan dengan Perencanaan, Pelaksanaan, dan pengawasan dalam Pengelolaan Desa khususnya Alokasi Dana Desa, sehingga dapat di bentuk suatu Perbaikan dalam merumuskan ,menyusun dan menetapkan keputusan tentang Kebijakan dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

2. Manfaat Teoritis :

Bagi Pemerintah Desa agar lebih meningkatkan Kinerjanya dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa terkait pembangunan yang terarah pada perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan, serta dapat mempertanggungjawabkan proses pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Keberhasilan pembangunan desa kepada masyarakat serta pemerintah yang telah mengalokasikan dana desa sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan, serta mengerjakan Laporan APBD sesuai dengan aturan yang ada.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu :

Putra dkk (2013) meneliti tentang “ pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa Di Desa wonorejo kecamatan singosari kabupaten malang:. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sebagian dari dana ADD untuk pemberdayaan masyarakat digunakan untuk biaya operasional pemerintah dan badan permusyawaratan desa (BPD) sehingga penggunaan ADD tidak sesuai dengan peruntukannya. Dalam perencanaan ADD tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan musyawarah desa cukup tinggi. Namun dalam proses penjangkaran aspirasi tersebut terkendala dari rendahnya pendidikan masyarakat sehingga aspirasi masyarakat cenderung bersifat pembangunan secara fisik (infrastruktur desa) seharusnya mengutamakan pemberdayaan masyarakat.dalam penganggaran ADD terjadi ketidak sesuaian antara bupati malang No 18 Tahun 2006 tentang alokasi dana desa. Dimana dana ADD untuk operasional badan permusyawaratan desa (BPD) yang seharusnya dimasukkan dalam RPD untuk operasional pemerintah desa akan tetapi justru dimasukkan pada RPD untuk pemberdayaan masyarakat.

Oksilawati, (2015), meneliti tentang “ Analisis Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa “. Hasil penelitian oksilawati akuntabilitas pengelolaan ADD di Desa bence sudah baik. Dimana pada tahap perencanaan di Desa bence pihak aparatur desa melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan melalui musyawarah

perencanaan pembangunan desa (Musrebangdes). Pada tahap pelaksanaan pihak aparaturnya memberikan pemberitahuan kepada masyarakat desa melalui papan pemberitahuan dimana program pembangunan itu dijalankan. Sedangkan tahap pertanggung jawaban yakni berupa laporan yang petunjuk teknisnya telah ditentukan oleh pemerintah kabupaten.

Juliska Mandey dan Femmy Tulusan (2015) dengan judul “ pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan alokasi dana desa (ADD) (suatu study di Desa Bukumatiti kecamatan jailolo kabupaten halmaher barat). Akuntabilitas atau pertanggung jawaban dalam pemberdayaan masyarakat terhadap pemanfaatan alokasi dana desa (ADD) di desa bukumatiti belum terwujud sesuai harapan masyarakat. Ini dikarenakan pemerintah Desa tidak ada laporan pertanggungjawaban tentang biaya yang dikeluarkan dalam pemanfaatan alokasi dana desa (ADD). Dengan demikian alokasi dana desa di desa bukumatiti pernah diberhentikan langsung oleh pemerintah kabupaten dengan catatan karena tidak ada pertanggung jawaban dalam setiap realitas dari program alokasi dana desa (ADD).

Pelaksanaan ADD masih belum memberikan dampak positif bagi desa, seperti penelitian yang dilakukan Ashari (2013) ADD di Kecamatan Ancalong Kabupaten Kutai Timur belum menunjukkan hasil yang positif bagi desa. Pelaksanaan ADD belum melalui prosedur yang tepat seperti perencanaan dan pertanggungjawaban yang menyebabkan efektifitas pelaksanaan ADD masih belum menunjukkan hasil. Hal serupa juga diungkapkan oleh Rosalinda (2014) yang menunjukkan bahwa tata kelola dana ADD masih belum efektif karena

mekanisme perencanaan yang belum memperlihatkan sebagai bentuk perencanaan yang efektif karena waktu yang sempit, kurang berjalannya fungsi lembaga desa, dan partisipasi masyarakat yang rendah. Berdasarkan hal tersebut tentunya memunculkan permasalahan yang menarik untuk dikaji yang berkaitan dengan proses pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa. Oleh karena itu, penelitian mengenai masalah tersebut penting untuk dilakukan, dengan melakukan penelitian dengan mengamati proses pengelolaan Alokasi Dana Desa yang selama ini telah dilaksanakan, agar dapat mengetahui apakah proses pengelolaan tersebut sesuai dengan prosedur yang ada dan mempunyai peran terhadap pembangunan pedesaan, di mana Alokasi Dana Desa sangat dibutuhkan oleh masyarakat demi tercapainya kesejahteraan dan pembangunan di Desa Sumberrejo, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian: “Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Pembangunan Pedesaan di Desa Sumberrejo Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara”.

2.1.1. Review Penelitian terdahulu

No	Nama Dan Tahun Penelitian Terdahulu	Tempat Penelitian Terdahulu	Judul Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian Terdahulu
1	Putra dkk 2013	Desa wonorejo kecamatan singosari kabupaten malang	Pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa	Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sebagian dari dana alokasi dana desa untuk pemberdayaan masyarakat digunakan untuk biaya operasional pemerintah dan badan pemusyawaratan desa atau BPD sehingga penggunaa alokasi dana desa tidak sesuai denga peruntukannya.
2	Oksilawati 2015	Desa bence	Analisis Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa	Hasil penelitian oksilawati akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di desa bence sudah baik. Dimana pada tahap perencanaan di desa bence pihak aparatur desa melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa atau musrembangdes. Pada tahappelaksanaan pihak aparatur memberikan pengetahuan kepada masyarakat desa melalui papan pemberitahuan di mana program pembangunan itu dijalankan. Sedangkan tahap pertanggungjawaban yakni berupa laporang yang petunjuk teknisnya telah ditentukan oleh pemerintah kabupaten.
3	Juliska mandey dan femmy tulusan 2015	Desa bukumatiti kecamatan jailolo kabupaten halmaher barat.	Pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan alokasi dana desa.	Akuntabilitas atau pertanggung jawaban dalam pemberdayaan masyarakat terhadap pemanfaatan alokasi dana desa di desa bukumatiti belum terwujud sesuai dengan harapan masyarakat. Ini dikarnakan pemerintah desa tidak ada laporan pertanggung jawaban tentang biaya yang dikeluarkan dalam pemanfaatan alokasi dana desa. Dengan demikian alokai dana desa di desa bukumatiti pernah diberhentikan langsung oleh pemerintah kabupaten dengan catatan karena tidak ada pertanggung jawaban dalam setiap realitas dari program alokasi dana desa.

4	Ashari 2013	Desa sumberrejo kecamatan donorojo kabupaten jepara	Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam upaya pembangunan pedesaan	tata kelola dana ADD masih belum efektif karena mekanisme perencanaan yang belum memperlihatkan sebagai bentuk perencanaan yang efektif karena waktu yang sempit, kurang berjalannya fungsi lembaga desa, dan partisipasi masyarakat yang rendah.
5	Yohana Kostansia Luturmase 2019	Desa Olilit Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar	Pengaruh Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Keberhasilan Pembangunan	Besarnya nilai koefisien regresi yang bertanda positif menunjukkan bahwa pengaruh variable Perencanaan, Pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pembangunan Desa di Desa Olilit Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar ada pengaruh positif, yang artinya setiap terjadi kenaikan satu unit skor Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan maka akan diikuti dengan meningkatnya keberhasilan pembangunan Desa Di Desa Olilit Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebesar 0.143, 0.178, dan 0.299 pada konstanta 1.302. Dengan demikian dapat diketahui bahwa pelaksanaan pembangunan Desa di Desa Olilit Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar dapat terlaksana dengan baik apabila didukung oleh program perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sesuai dengan kebutuhan dan program pembangunan di Desa Olilit Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Pemerintah Desa

Pengertian pemerintah desa :

Pemerintah adalah proses, cara, perbuatan memerintah yang berdasarkan demokrasi, gubernur memegang tampuk di daerah tingkat I, segala urusan yang dilakukan Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan

kepentingan Negara. Pemerintah adalah suatu cara bagaimana dinas umum dipimpin dengan sebaik – baiknya.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah adalah badan yang melakukan kekuasaan untuk memerintah, sehingga dia mempunyai kekuasaan dan kewibawaan untuk mengarahkan, membina dan membimbing warganya ke arah pencapaian tujuan.

Sedangkan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah dan wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan NKRI. Desa menurut universal adalah sebuah aglomerasi pemukiman di area perdesaan (rural). Di Indonesia, istilah Desa adalah pembagian wilayah administrative di Indonesia di bawah kecamatan yang dipimpin oleh kepala Desa. Selain itu desa adalah kesatuan organisasi pemerintah yang terendah mempunyai batas wilayah tertentu, langsung dibawah kecamatan, dan merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya. Berdasarkan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, desa diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dan diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah NKRI. Dari dua kata di atas yaitu pemerintah dan desa diperoleh pengertian yang baru yaitu : pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul

dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintah NKRI.

Namun Desajika dijabarkan dalam pengertian yang lebih luas lagi tidak hanya mencakup ruang lingkup demografis atau sebatas pembatas luas wilayah secara fisik saja, tetapi desa juga mempunyai karakter social yang berbeda satu sama lainnya. Sehingga kebanyakan dari factor itulah sering mempengaruhi kemajuan desa, salah satu factor social tersebut adalah pendidikan. Di dalam sumber lain juga dikatakan bahwa pemerintah desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat memiliki peranan yang strategis dalam pengaturan masyarakat desa/kelurahan dan keberhasilan pembangunan Nasional. Selain itu pemerintah desa adalah badan yang melakukan kekuasaan memerintah dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat yang berada di bawa camat atau desa.

Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pemerintah desa adalah badan atau lembaga yang melakukan kekuasaan memerintah dalam rangka kegiatan atau penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk mengatur, mengayomi dan mensejahterakan masyarakat yang pelaksanaannya oleh organisasi yang terendah langsung di bawah camat. Dari beberapa pengertian di atas dapat diketahui bahwa desa adalah bagian yang terkecil dalam susunan pemerintah yang dikepalai dengan seorang kepala desa , dalam pelaksanaan kerjanya pemerintah desa mempunyai kewenangan yang dapat diatur sendiri oleh masing – masing individu sebagai perangkat desa. Namun kewenangan tersebut tidak serta merta bebas tanpa ada batas, kewenangan yang dimiliki pemerintah

desa dalam mengelola jalannya roda pemerintahan harus sesuai dan memperhatikan adat istiadat masyarakat selain itu juga karakter local masyarakat juga harus tetap di jaga sebagai suatu ciri dan keistimewaan yang dimiliki oleh masing – masing desa.

Pemerintah desa telah diketahui mempunyai hak dalam mengatur dan menjalankan roda pemerintah rumah tangga sendiri. Adapun kewenangan desa, Yakni :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintah yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa.
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang di serahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
- c. Tugas pembantuan dari Pemerintah , Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota.
- d. Urusan pemerintah lainnya yang diserahkan kepada Desa.

Peran pemerintah desa memang dirasa sangat dibutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, inovasi – inovasi baru serta perhatian pemerintah desa pada sarana prasarana desa juga sangat diperlukan demi terwujudnya pembangunan yang seutuhnya sejalan dengan pembangunan Nasional Bangsa Indonesia. Dalam menghadapi pembangunan Nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas individu dan kualitas masyarakat agar dapat mencapai pembangunan

yang berkelanjutan, diperlukan peninjauan kembali terhadap system administrasi Negara Indonesia. Rangkaian upaya semacam itu dikenal dalam literature sebagai modernisasi atau reformasi administrasi.

Menyadari pentingnya suatu system administrasi Negara yang berkapasitas untuk melaksanakan pembangunan yang sedang berubah orientasinya, pemerintah Indonesia sejak awal masa pembangunan telah melancarkan serangkaian upaya modernisasi administrasi yang dikenal dengan upaya pendayagunaan aparatur inilah yang bisa meningkatkan kualitas pemerintah desa dalam kinerja melayani masyarakat. Esensi dari pembangunan Nasional adalah pembangunan berkelanjutan yang merupakan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan – kebutuhan pada saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan – kebutuhan mereka, konsep ini mengandung dua unsur, Yakni :

Yang pertama adalah *kebutuhan*, khususnya kebutuhan dasar bagi golongan masyarakat yang kurang beruntung, yang amat perlu mendapatkan prioritas tinggi dari semua Negara.

Yang kedua adalah *keterbatasan*, penguasa teknologi dan orientasi social harus memperhatikan keterbatasan, kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan manusia pada saat ini dan di masa depan. Untuk itu tujuan pembangunan Negara berkembang perlu dirumuskan kembali agar transformasi social, ekonomi, dan politik dapat terlaksana secara cepat tanpa merusak keharmonisan hubungan antara manusia dan lingkungan. Pembangunan yang

berkualitas dan pembangunan kualitas manusia mengharuskan terciptanya kondisi yang memungkinkan masyarakat di daerah, memenuhi kebutuhannya dengan menggunakan dan mengontrol pembangunan sumberdaya setempat, karna itu salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan ini adalah seberapa jauh kemandirian dalam memenuhi kebutuhan dasar oleh sumber – sumber local dengan pertukaran material yang sekecil mungkin antar satuan ekonomi local. Untuk mencapai sasaran ini dalam perumusan kebijaksanaan pembangunan pedesaan di Negara sedang berkembang perlu diadakan program – program yang semakin menekankan control oleh masyarakat serta manajemen sumber – sumber setempat. Dengan demikian kepada masyarakat di beri insentif dan motivasi sebesar – besarnya untuk memaksimalkan kapasitas pembangunan secara berkelanjutan.

2.2.2. Pengertian Pengelolaan Alokasi Dana Desa

1. Pengelolaan Menurut Para Ahli :

Menurut prajudi Atmosudirdjo (1982), pengelolaan adalah : kegiatan pemanfaatan dan pengendalian atas semua sumberdaya yang diperlukan untuk mencapai ataupun menyelesaikan tujuan tertentu.

Menurut George T.Terry, pengelolaan adalah : pemanfaatan sumberdaya manusia ataupun sumberdaya lainnya yang dapat diwujudkan dalam kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Andrew F.Sikul, pengelolaan adalah : serangkaian aktivitas – aktivitas koordinasi yang mencakup perencanaan, pengorganisasian,, pengarahan,

pengendalian, penempatan serta pengambilan keputusan untuk menghasilkan suatu produk dan jasa yang efektif dan efisien.

2. Alokasi memiliki beberapa arti :

- a. Alokasi adalah : sebuah Homonim karna arti – artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda.
- b. Alokasi memiliki arti dalam bidang ilmu ekonomi dan keuangan, sosiologi, dan manajemen.
- c. Alokasi memiliki kelas dalam nomina atau kata benda sehingga Alokasi dapat menyatakan Nama dari seseorang, tempat atau semua benda dan segala hal yang dibedakan.

Alokasi Berarti : penentuan banyaknya barang yang disediakan untuk suatu tempat (pembelian dan sebagainya), penjatahan. Sedangkan

3. Dana Desa :

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukan bagi desa dan desa adat yang di transfer melalui anggaran pendapatan belanja dan daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Alokasi Dana Desa Merupakan anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa yang mana sumbernya berasal dari bagi hasil pajak daerah serta dari dana daerah yang diterima oleh kabupaten. Sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri No 37

Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa di dalam pasal 18 menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari APBD kabupaten/kota yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen).

2.2.3. Pengertian tentang perencanaan

Dalam investorword.com didefinisikan “ the process of setting goals, developing strategies, and outlining tasks and schedules to accomplish the goals”, Perencanaan adalah proses menetapkan tujuan, mengembangkan strategi dan menguraikan tugas dan jadwal untuk mencapai tujuan.

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa suatu planning atau perencanaan adalah merupakan proses menuju tercapainya tujuan tertentu. Dalam istilah lain merupakan persiapan yang terarah dan sistematis agar tujuan dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Kaufman (1972) sebagaimana dikutip harjanto, perencanaan adalah suatu proyeksi tentang apa yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan abash dan bernilai.

Bintoro tjokroaminoto mendefinisikan perencanaan sebagai proses mempersiapkan kegiatan – kegiatan secara sistematis yang akan diwakilkan untuk mencapai tujuan tertentu.

Dari pendapat diatas menyiratkan bahwa perencanaan merupakan proses yang berisi kegiatan – kegiatan berupa pemikiran, perhitungan, pemilihan, penentuan dan sebagainya, yang semuanya itu dilakukan dalam

rangka tercapainya tujuan tertentu. Pada hakekatnya perencanaan merupakan proses pengambilan keputusan atas sejumlah alternative (pilihan) mengenai sasaran dan cara – cara yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang guna mencapai tujuan yang dikehendaki serta pamantauan dan penilaiannya atas hasil pelaksanaannya yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan.

Perencanaan memiliki urgensi yang sangat bermanfaat dalam hal :

1. Standar pelaksanaan dan pengawasan
2. Pemilihan berbagai alternative
3. Penyusunan skala prioritas baik sasaran maupun kegiatan
4. Menghemat pemanfaatan sumberdaya organisasi
5. Membantu manager menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan
6. Alat yang memudahkan dalam berkoordinasi dengan pihak terkait
7. Alat meminimalkan pekerjaan yang tidak pasti

Manfaat lain dari perencanaan :

1. Menjelaskan dan merinci tujuan yang ingin di capai
2. Memberikan pegangan dan menetapkan kegiatan – kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu
3. Organisasi memperoleh standar sumberdaya terbaik dan mendayagunakan sesuai tugas pokok fungsi yang telah ditetapkan
4. Menjadi rujukan anggota organisasi dalam melaksanakan aktivitas yang konsisten, prosedur,dan tujuan

5. Memberikan batas wewenang dan tanggungjawab bagi seluruh pelaksana
6. Memonitor dan mengukur berbagai keberhasilan secara insentif sehingga bisa menemukan dan memperbaiki penyimpangan secara dini
7. Memungkinkan untuk terpeliharanya persesuaian antara kegiatan internal dengan situasi eksternal
8. Menghindari pemborosan, Dengan adanya pemborosan maka pelaksanaan (SOP) dan pengawasan, skala prioritas, tujuan, batasan wewenang, pedoman kerja dan sebagainya, memungkinkan seluruh personil yang terlibat dalam organisasi atau tim akan dapat bekerja lebih transparan dan penuh tanggung jawab, efektif dan efisien.

Terdapat beberapa indikator yang dipaparkan oleh A.M. Williams :1966 dalam Affifuddin yang meliputi :

- a. Menentukan atau menetapkan dengan jelas maksud dan tujuan :
Berarti menentukan kebijaksanaan – kebijaksanaan yang akan dilakukan. Maksud dan tujuan itu adalah sasaran yang ingin dicapai, dan dengan menentukan kebijaksanaan terhadap apa yang akan ditempuh untuk menyelesaikan tujuan tersebut.
- b. Menentukan alternatif :
Artinya bahwa pimpinan atau manajer harus menghitung faktor – faktor yang dihadapi, yaitu kejadian – kejadian yang akan datang. Begitu juga mengenai faktor waktu yang harus diperhitungkan.

c. Mengatur sumber – sumber yang diperlukan :

Antara lain tenaga kerja, biaya, peralatan, bahan – bahan atau perlengkapan. Waktu yang diperlukan. Hal tersebut harus sudah tersedia bila diperlukan.

Riyadi dan bratakusumah (2004) menjelaskan faktor – faktor yang dapat mempengaruhi perencanaan pembangunan, yakni :

1. Faktor lingkungan

Faktor lingkungan baik eksternal maupun internal, yang dapat mencakup bidang sosial, budaya, ekonomi, dan politik, faktor eksternal biasanya datang dari pengaruh global yang berkembang dalam lingkup nasional maupun internasional. Sedangkan faktor internal, merupakan pengaruh yang datang dari wilayah perencanaan itu sendiri.

2. Faktor sumberdaya manusia perencana

Seperti halnya setiap kegiatan, baik yang dilaksanakan oleh individu maupun organisasi atau kelompok. Sumber daya manusia selalu menjadi faktor utama sebagai penggerak. Sementara itu perencanaan yang baik juga memungkinkan untuk dapat diimplementasikan dalam program pembangunan. Kualitas perencanaan yang baik tergantung pada kemampuan dan keahlian dari para perencananya disamping teknik dan metode yang digunakan.

3. Faktor pendanaan

Faktor pendanaan pada dasarnya merupakan faktor yang sudah given. Artinya, hal itu memang harus ada untuk melakukan suatu kegiatan

atau aktivitas. Pelaksanaan perencanaan harus benar – benar serius, dalam arti pihak – pihak yang berkaitan termasuk para perencananya harus fokus pada tugasnya. Selain itu dalam perencanaan pembangunan harus sudah dapat diperhitungkan atau dipertimbangkan masalah – masalah pendanaan. Mulai dari berapa jumlah yang dibutuhkan (anggaran).

Berdasarkan penjelasan yang ada maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa tahap perencanaan pembangunan merupakan suatu siklus yang memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya.

2.2.4. Pengertian pelaksanaan

Menurut Westa (1985 : 17) Implementasi atau pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan.

Menurut Abdullah (1987 : 5) bahwa Implementasi adalah suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Menurut Syaukani dkk (2004 : 295) Implementasi adalah pelaksanaan serangkaian kegiatan dalam rangka untuk memberikan kebijakan publik sehingga kebijakan dapat membawa hasil, seperti yang diharapkan.

Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier di Wahab (2005 : 65) menjelaskan arti dari pelaksanaan ini dengan mengatakan bahwa pemahaman yang sebenarnya apa yang terjadi setelah program dinyatakan berlaku atau dirumuskan fokus kebijakan pelaksanaan, yaitu peristiwa dan bekerja dengan kegiatan yang timbul setelah pedoman disahkannya kebijakan negara, yang meliputi upaya untuk mengelola serta atas konsekuensi / dampak nyata pada orang-orang atau peristiwa.

Menurut Hanifah Harsono dalam bukunya yang berjudul Implementasi Kebijakan dan Politik menyatakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut :

Implementasi adalah proses untuk melaksanakan kebijakan tersebut ke dalam tindakan kebijakan politik dalam pembangunan Kebijakan administrasi dalam rangka meningkatkan program. (Harsono, 2002: 67).

Menurut Purwanto (2015:106-110), ada berbagai indikator yang dapat digunakan untuk melihat kinerja implementasi kebijakan:

1. Akses

Akses mengandung pengertian terjadinya kesamaan kesempatan bagi semua kelompok sasaran, apapun karakteristik individual maupun kelompok yang melekat pada dirinya, seperti gender, etnisitas, agama dan afiliasi politik. Akses

juga berarti tidak terjadinya diskriminasi untuk terlibat dan menikmati manfaat kebijakan atau program karena karakteristik yang melekat pada individu atau kelompok.

2. Akuntabilitas

Indikator ini digunakan untuk menilai apakah tindakan para implementer dalam menjalankan tugas mereka untuk menyampaikan keluar kebijakan kepada kelompok sasaran dapat dipertanggung jawabkan atau tidak.

3. Kesesuaian Program dan Kebutuhan.

Indikator ini digunakan untuk mengukur apakah berbagai keluaran kebijakan atau program yang diterima oleh kelompok sasaran memang sesuai dengan kebutuhan mereka atau tidak.

Adapun Faktor-faktor yang dapat menunjang atau factor yang mempengaruhi program pelaksanaan adalah sebagai berikut:

a. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan.

b. Sumber daya, dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan

tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.

2.2.5. Pengertian pengawasan

Menurut George R. Terry yang dimaksud dengan pengawasan adalah Untuk menentukan apa yang telah dicapai, mengadakan evaluasi atasnya, dan untuk menjamin agar hasilnya sesuai dengan rencana.

Henry Fayol mengatakan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan adalah :Pengawasan terdiri dari pengujian apakah segala sesuatu berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dengan instruksi telah digariskan. Hal tersebut bertujuan untuk menunjukkan atau menentukan kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan dengan maksud untuk memperbaikinya dan mencegah terulangnya kembali kesalahan-kesalahan tersebut.

Newman menyebutkan bahwa pengawasan adalah sesuai dengan rencana. Dari definisi pengawasan tersebut di atas, dapatlah disimpulkan bahwa dalam definisi pengawasan terdapat dua bagian, yaitu : Berupa inti atau wujud perbuatan dalam pengawasan. Menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh pengawasan.

pengawasan yang lain diutarakan oleh Victor M. Situmorang, SH dan Jusuf Juhir, SH dalam bukunya yang berjudul Aspek Hukum Pengawasan Melekat, mereka mengatakan bahwa : Pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai.

Menurut Admosudirdjo (dalam Febriani, 2005:11), Pengawasan adalah keseluruhan daripada kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma, standar atau rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Terry (dalam Sujamto, 1986:17), Pengawasan adalah untuk menentukan apa yang telah dicapai, mengadakan evaluasi atasannya, dan mengambil tindakan-tindakan korektif bila diperlukan untuk menjamin agar hasilnya sesuai dengan rencana.

Menurut Dale (dalam Winardi, 2000:224) dikatakan bahwa pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan.

Indikator pengawasan, Hani Handoko (2003:362) menyatakan bahwa ada beberapa indikator dalam proses pengawasan kerja, diantaranya adalah :

1. Penetapan standar

Standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukur yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil – hasil.

2. Penentuan pengukuran atau penilaian kerja

Penetapan standar adalah sia – sia bila tidak disertai berbagai cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata. Oleh sebab itu, langkah ke dua dalam proses pengawasan adalah menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara cepat.

3. Pengukuran pelaksanaan kinerja

Ada berbagai cara untuk melakukan pengukuran pelaksanaan, yaitu :Pengamatan (observasi) dan laporan – laporan baik tertulis maupun lisan.

4. Perbaikan atas penyimpangan

Bila hasil analisa menunjukkan perlunya tindakan koreksi, tindakan ini harus diambil. Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk, seperti :mengubah standar mula – mula, mengubah pengukuran pelaksanaan, dan mengubah cara dalam menganalisa dan menginterpretasikan penyimpangan – penyimpangan.

Faktor – faktor yang mempengaruhi pengawasan Menurut Mulyadi (2007:770) yakni :

1. Perubahan yang selalu terjadi baik dari luar maupun dari dalam organisasi.
2. Kompleksitas organisasi memerlukan pengawasan formal karena adanya desentralisasi kekuasaan.
3. Kesalahan atau penyimpangan yang dilakukan anggota organisasi. Memerlukan pengawasan.

2.2.6. Pengertian pembangunan

Pembangunan atau Development adalah suatu proses perubahan yang mencakup seluruh system social seperti politik, ekonomi,

infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi atau kegiatan yang direncanakan untuk mendapatkan suatu perubahan kearah yang lebih baik.

Menurut Kartasmita (2001:66) mengatakan bahwa hakekat pembangunan Nasional adalah manusia itu sendiri yang merupakan titik pusat dari segala upaya pembangunan yang akan di bangun adalah kemampuan kekuatannya sebagai pelaksanan dan penggerak pembangunan.

Menurut suparno (2001:46) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai suatu usah atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan berencana yang akan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan Bangsa (Nation Building).

Menurut Riyadi Dan Deddy Supriyadi Bratakusumah “2005” istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah yang lainnya, negara satu dengan negara lain. Namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan.

Menurut Inayatullah, Menurutnya pembangunan ialah perubahan menuju pola-pola masyarakat yang memungkinkan realisasi yang lebih baik dari nilai-nilai kemanusiaan yang memungkinkan suatu masyarakat mempunyai kontrol yang lebih besar terhadap lingkungan dan terhadap tujuan politiknya dan yang memungkinkan pada warganya memperoleh kontrol yang lebih terhadap diri mereka sendiri.

Shoemaker mengungkapkan Pengertian Pembangunan merupakan suatu jenis perubahan sosial dimana ide-ide baru diperkenalkan kepada suatu sistem sosial untuk menghasilkan pendapatan perkapita dan tingkat kehidupan yang lebih tinggi melalui metode produksi yang lebih modernisasi pada tingkat sistem sosial.

Menurut Deddy T. Tikson (2005) bahwa pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan.

Menurut Todaro bahwa pengertian pembangunan dibagi dalam tiga komponen dasar, sebagai basis konseptual dan pedoman praktis dalam memahami pembangunan yang paling hakiki yakni kecukupan yang memenuhi kebutuhan pokok, meningkatkan rasa harga diri atau jati diri serta kebebasan dalam memilih. Selanjutnya pengertian pembangunan menurut Todaro bahwa sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan.

Salah satu tahapan penting dalam suatu pembangunan adalah perencanaan. Menurut Waterson, bahwa perencanaan mencakup penghematan sumber-sumber daya langka oleh otoritas yang dibentuk oleh masyarakat banyak. Olehnya itu, perencanaan harus mencakup upaya yang terorganisasi, sadar dan kontinyu demi menemukan alternatif-alternatif terbaik yang bisa

ditempuh untuk mencapai tujuan khusus. Hal tersebut, dibedakan dalam perencanaan alokatif dan inovatif. Alokatif adalah mementingkan distribusi sumber daya yang terbatas di kalangan para pemakai bersaing mendapatkannya, sedangkan definisi dari perencanaan inovatif adalah mementingkan untuk adanya perubahan struktural dalam suatu sistem hubungan kemasyarakatan.

Menurut Rogers, Suatu proses perubahan sosial dengan partisipatori yang lauas dalam suatu masyarkat yang dimaksudkan untuk kemajuan sosial dan material “termasuk bertambah besarnya kebebasan, keadilan dan kualitas lainnya yang dihargai” untuk mayoritas rakyat melalui kontrol yang lebih besar yang mereka peroleh terhadap lingkungan mereka.

Pada umumnya pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur social, sikap – sikap masyarakat dan institusi – institusi nasional, disamping tetap mengejar pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Jadi pada hakekatnya , pembangunan harus mencerminkan terjadinya perubahan secara total suatu mesyarakat atau penyesuaian system social secara keseluruhan , tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual maupun kelompok – kelompok social yang ada di dalamnya, untuk bergerak maju menuju suatu kondisi kehidupan yang serba lebih baik.

indikator keberhasilan pembangunan itu akan nampak pada :

(1) sejauh mana kondisi dan taraf hidup masyarakat berhasil ditingkatkan.

(2) sejauh mana keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan berhasil digerakkan (Taliziduhu, 1987).

Dilihat dari ketiga ukuran keberhasilan pembangunan berdasarkan konsepsi di atas, maka dengan melihat hasil-hasil pembangunan sekarang ini jelas masih jauh dari harapan atau masih belum mencapai hasil yang memuaskan. Memang secara teoritis diakui bahwa keberhasilan pembangunan itu bergantung pada banyak aspek-seperti biaya, informasi, partisipasi, peralatan, tenaga terlatih, kewenangan yang sah, dan lain-lainnya (atz, Dalam Taliziduhu, 1989). Namun dengan melihat tingkat kualitas sumber daya manusia di daerah telah diidentifikasi di atas, maka timbul dugaan bahwa permasalahan kekurangan berhasilnya (rendahnya) pembangunan di daerah tersebut antara lain disebabkan atau adahubungannya dengan rendahnya kualitas (kemampuan fisik dan nonfisik) dari pada sumber daya manusia melaksanakan pembangunan.

Factor – factor yang mempengaruhi kesuksesan pembangunan Desa, yakni :

1. Partisipasi masyarakat, Partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007:27) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, Pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, Pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Dari pengertian menurut para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan atau keikutsertaan seseorang masyarakat dalam proses interaksi sosial, Pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat dalam situasi tertentu, baik dalam pengambilan keputusan (solusi) menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan proses keterlibatan masyarakat di dalam mengevaluasi perubahan yang terjadi.

2. Alokasi dana Desa (ADD) Kinerja aparatur desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa di Desa Olilit didukung oleh beberapa faktor. faktor tersebut adalah dukungan dana dari pemerintah daerah yang diberikan melalui Alokasi Dana Desa (ADD) dan kemudian peralatan kantor yang sudah cukup lengkap. Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana bantuan langsung yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya di lakukan dan dipertanggung jawabkan oleh Kepala Desa. Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa (ADD) di maksudkan sebagai bantuan stimulant atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong-royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa. Seluruh kegiatan yang didanai Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan secara administrasi, teknis dan hukum. Dimana Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

2.3. Kerangka Konseptual

Untuk memudahkan peneliti dalam melaksanakan penelitian mengenai Pengaruh Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Keberhasilan Pembangunan di Desa Olilit Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Maka peneliti membuat kerangka konseptual atau kerangka pikir sebagai panduan sehingga tujuan penelitian ini dapat tercapai dengan baik.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa merupakan sebuah produk era reformasi yang menjadi bentuk awal kemandirian desa dalam menyelenggarakan pemerintahan maupun dalam pengelolaan keuangan desa. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah memberikan petunjuk teknis mengenai proses pengelolaan alokasi dana desa melalui peraturan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor 4 Tahun 2015 tentang pengelolaan alokasi dana desa.

Guna mencapai tertib anggaran, efisien dan efektif serta transparan dalam pemanfaatan dan pengelolaan dana desa bagi penyelenggaraan pemerintah,

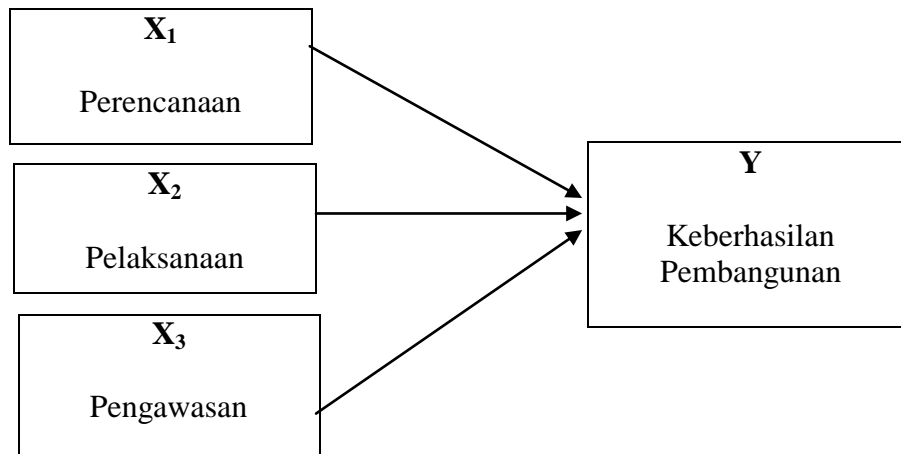
pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat maka perlu diatur pengelolaan dana desa.

Penyelenggaraan pemerintah desa adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan dan pembangunan desa berdasarkan kewenangan desa Olilit Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang ada, meliputi : perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Dimana perencanaan adalah pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya, kemudian yang dimaksud dengan pelaksanaan adalah pelaksanaan penggunaan Alokasi dana desa yang akan digunakan untuk pembangunan desa, pengawasan adalah tindakan yang dilakukan bukan hanya aparat desa melainkan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam pengawasan terhadap pembangunan desa.

Pemerintah desa adalah kepala desa dan perangkat desa adalah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa. Sedangkan Alokasi Dana Desa merupakan Dana yang di alokasikan pemerintah untuk mengembangkan atau memenuhi kebutuhan masyarakat melalui tangan aparat atau pemerintah desa sehingga desa dapat berkembang dengan baik, dan dapat melayani masyarakat serta dapat memenuhi kepuasan masyarakat di Desa Olilit Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Gambaran singkat pengelolaan alokasi dana desa di desa Olilit Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar melalui skema berikut :

Gambar. 2.1.
Skema kerangka konseptual penelitian



2.4. Hipotesis

Berdasarkan penelitian diatas serta kerangka konseptual yang telah peneliti paparkan di atas maka hipotesis yang akan di ajukan pada penelitian ini adalah :

“ Terdapat pengaruh pengelolaan Alokasi Dana Desa yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan baik secara parsial maupun simultan terhadap keberhasilan pembangunan di Desa Olilit Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar “.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dimana penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pengambilan sampel dari suatu populasi dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data.

3.2. Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti, berlokasi di Kantor Desa Olilit Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

3.3. Identifikasi Variabel dan Definisi Operasional Variabel

3.3.1. Identifikasi Variable

Variabel penelitian merupakan factor – factor yang berperan dalam peristiwa atau gejala yang akan di teliti :

1. variabel Bebas (Variabel independen) :

Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi dan yang menjadi penyebab timbulnya variabel dependen (Sugiyono, 2011).

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah :

X_1 : perencanaan, X_2 : pelaksanaan, X_3 : pengawasan

2. Variable terikat (Variabel Dependen) :

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2011). Dalam

penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah : keberhasilan pembangunan (Y)

3.3.2. Definisi operasional variabel

Menurut sugiyono (2012:59) yang menjelaskan tentang pengertian dari variabel yakni : “ variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan ditarik kesimpulannya “.

Definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini kemudian diuraikan menjadi indikator empiris yang meliputi:

Tabel 3.1.

VARIABEL	INDIKATOR
X₁ Perencanaan :	Menurut Williams : 1966 dalam Affifuddin meliputi : <ul style="list-style-type: none"> - Penetapan maksud dan tujuan - Penetapan Alternative - Pengaturan Sumber yang diperlukan
X₂ Pelaksanaan :	Menurut Purwanto (2015:106-110), meliputi : <ul style="list-style-type: none"> - Akses - Akuntabilitas - Kesesuaian program dan kebutuhan
X₃ Pengawasan :	Menurut Hani Handoko (2003:362), meliputi : <ul style="list-style-type: none"> - Penetapan standar - Penentuan pengukuran/penilaian kerja - Pengukuran pelaksanaan kinerja - Perbaikan atas penyimpangan
Y : Keberhasilan Pembangunan	Menurut Taliziduhu, 1987), meliputi : <ul style="list-style-type: none"> - Kondisi dan taraf hidup masyarakat - Partisipasi masyarakat

3.4. Populasi Dan Sampel Penelitian

3.4.1. Populasi

Populasi merupakan wilayah yang ingin diteliti, menurut Sugiyono (2011:80) “ populasi adalah wilayah regeneralisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya “.Dari definisi diatas maka peneliti memaparkan populasi dalam penelitian ini yakni :

Tabel 3.2.

Seluruh Perangkat Desa	8
Kepala Dusun	1
Ketua RT/RW	24
Tokoh masyarakat (mantan kepala Desa, tua – tua adat)	7
Jumlah	40

3.4.2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin di teliti oleh peneliti, Menurut pendapat sugiyono (2011:81) “ sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut “ sehingga sampel merupakan bagian dari populasi yang ada, maka untuk pengambilan sampel harus menggunakan cara tertentu yang didasarkan oleh pertimbangan – pertimbangan yang ada.

Dari definisi di atas, maka peneliti memaparkan sampel dalam penelitian ini, yakni: total populasi sejumlah 40 orang.

3.5. Sumber Data

Dalam penulisan proposal ini data yang disampaikan penulis diperoleh dari pihak pemerintah Desa Olilit Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar Menggunakan Data Sekunder atau menggunakan literatur – literatur lain yang mendukung penulisan Skripsi ini.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data di lapangan pada penelitian ini maka dilakukan dengan teknik sebagai berikut :

➤ Teknik Kuesioner :

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui penyebaran daftar pertanyaan kepada para responden untuk di isi atau di jawab sesuai dengan petunjuk serta pertanyaan – pertanyaan yang telah peneliti paparkan pada lembar pertanyaannya. Daftar pertanyaan yang akan di ajukan kepada responden di susun dengan alternative jawaban yang sekiranya sesuai dengan pendapat, pengetahuan, dan pandangan dari responden.

Bobot skor yang ditetapkan oleh peneliti mengacu pada model skala

Likert, yaitu :

Jawaban A, dengan bobot skor 5,

Jawaban B, dengan bobot skor 4,

Jawaban C, dengan bobot skor 3,

Jawaban D, dengan bobot skor 2,

Jawaban E, dengan bobot skor 1,

3.7. Teknik Analisis Data :

3.7.1. Uji validitas instrument penelitian

Menurut Sugiyono (2010:267), Uji validitas menyatakan bahwa instrumen yang digunakan untuk mendapatkan data dalam penelitian dapat digunakan atau tidak. Uji validitas instrumen dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang telah dirancang dalam bentuk kuisioner benar – benar dapat menjalankan fungsinya. Untuk melihat valid tidaknya suatu alat ukur digunakan melalui pendekatan statistika, yaitu melalui nilai koefisien korelasi skor butir pernyataan dengan skor total butir pernyataan, apabila koefisien korelasinya lebih besar atau sama dengan 0,30 maka pernyataan tersebut dinyatakan valid.

3.7.2. Uji Reliabilitas Instrument penelitian

Uji reliabilitas menurut Sugiyono (2010:354), dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh hasil pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur yang sama. Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang dirancang dalam bentuk kuisioner dapat diandalkan, suatu alat ukur dapat diandalkan jika alat ukur tersebut digunakan berulang kali akan memberikan hhasil yang relatif sama (tidak beda jauh) untuk melihat andal tidaknya suatu alat

ukur digunakan pendekatan secara statistika, yaitu melalui koefisien reliabilitas dan apabila koefisien reliabilitasnya lebih besar dari 0,60 maka secara keseluruhan pernyataan tersebut dinyatakan andal (reliabel).

3.8. Analisis Deskripsi variabel penelitian

Deskripsi jawaban responden terhadap kuisisioner adalah suatu uraian atas pendapat responden mengenai kuisisioner yang telah peneliti sampaikan. Perlu diketahui bahwa deskripsi jawaban responden ini peneliti sajikan dalam bentuk tabulasi dan prosentasi.

Hasil pendistribusian skor alternatif jawaban kuisisioner penelitian kemudian diinterpretasikan berdasarkan hasil presentase setiap jawaban responden tersebut kemudian dikualifikasikan, sebagaimana dikemukakan Arikunto (1998 : 32) bahwa : “ sudah sampai ke presentase lalu ditafsirkan dengan kalimat yang bersifat kualitatif “.

3.8.1. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda adalah untuk mengetahui adanya pengaruh variabel bebas baik secara parsial dan simultan, hal tersebut dilakukan karena variabel bebasnya lebih dari satu. Jadi analisis ini dapat dilakukan jika jumlah variabel bebasnya minimal 2 (sugiyono, 1999).

Model regresi linier berganda digunakan untuk menjelaskan pengaruh pengelolaan alokasi dana desa melalui perencanaan (X_1), pelaksanaan (X_2), dan pengawasan (X_3), terhadap keberhasilan pembangunan desa (Y) di Desa Olilit Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dimana persamaan operasional yang digunakan adalah :

$$Y = a + bx_1 + bx_2 + bx_3$$

Dimana :

X_1 = perencanaan

X_2 = pelaksanaan

X_3 = pengawasan

Y = Keberhasilan Pembangunan

a = konstanta

b = koefisien regresi

3.8.2. Koefisien Korelasi (R)

Koefisien korelasi (R) menurut Wirawan (2002) adalah : “ jika semua titik terletak pada garis regresi sampel maka $R = 1$, dalam hal ini dikatakan sesuai secara sempurna (*perfect fit*)”.

Koefisien korelasi (R) digunakan untuk mengukur besar keeratan hubungan atau pengaruh variabel bebas dengan variabel terikat. Ketentuan yang dijadikan dasar dalam menentukan besar – kecilnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat , apabila :

1. Bila $R = 1$ artinya terdapat korelasi yang kuat antara variabel perencanaan (X_1), pelaksanaan (X_2), dan pengawasan (X_3) terhadap keberhasilan pembangunan (Y) di Desa Olilit Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
2. Bila $R = 0$ artinya tidak terdapat korelasi yang kuat antara variabel perencanaan (X_1), pelaksanaan (X_2), dan pengawasan (X_3) terhadap

keberhasilan pembangunan (Y) di Desa Olilit Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

3.9. Pengujian Hipotesis Penelitian

Pengujian ini digunakan untuk mengetahui secara parsial pengaruh maupun simultan terhadap pengelolaan alokasi dana desa yang dimulai dari perencanaan (X_1), pelaksanaan (X_2), pengawasan (X_3) terhadap keberhasilan pembangunan (Y) di Desa Olilit Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Adapun kriteria pengujian yang digunakan apabila :

1. Jika nilai t hitung lebih besar dari t tabel dan nilai signifikan variabel bebas lebih kecil dari nilai α (0,05), maka hipotesis diterima, berarti variabel bebas berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel terikat.
2. Jika nilai t hitung lebih kecil dari t tabel dan nilai signifikan variabel bebas lebih besar dari nilai α (0,05), maka hipotesis ditolak, berarti tidak ada pengaruh variabel bebas secara positif dan signifikan terhadap variabel terikat.

Proses penghitungan untuk keperluan analisis data dilakukan dengan menggunakan bantuan komputer dengan *software* statistik SPSS (*Statistical program for social sciences*).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Obyek penelitian

Letak Geografis Kantor Desa Olilit :

- Sebelah timur berbatasan dengan Desa Olilit timur
- Sebelah barat berbatasan dengan kota saumlaki
- Sebelah selatan berbatasan dengan Pertamina
- Sebelah utara berbatasan dengan Desa Sifnana

4.1.1. Sejarah singkat Desa Olilit

Dahulu kala di ujung jasih pulau yamdena sebelah selatan, ada beberapa perkampungan di masa abad 17 dan 18. Perkampungan itu rata – rata terdiri dari inyametan yang artinya kumpulan satu mata rumah yang kelak bergabung menjadi suan (marga) dan beberapa marga bergabung menjadi sebuah inue (kampung/Desa)

Inue (kampung/Desa) itu adalah :

1. Pampotam ain
2. Tutun resi
3. Kewaki
4. Lakateru

Adapun inue (perkampungan) terdiri dari mata rumah yang digabungkan menjadi soa (soa yang dimaksudkan di sini adalah suan/marga) dan

beberapa soa digabungkan menjadi inue (perkampungan/desa).
(soa=suan)

Inue potamain , marga – marganya adalah sebagai berikut :

1. Soa futwembun dengan nama suku (keluarga) jaat/taborat, kelyomnar. Awear, slaru dengan nama rumah (marga) ; kelbulan,oratmangun, metamtomwate, ranmaru, matkus, romrome fasse, fenanlampir, batbual, mempinan.
2. Soa futunanebun, dengan nama suku : maselar, kelanar dengan nama rumah ; luturmele, ngilawayan, batmomolin silai, batmomolin marumat, rutume, sikafir, rangkoli, kadun.
3. Soa ivakdalam, dengan nama suku : seranulnir, onyomar, ipnuar, serar, laurnan jensear, dengan nama rumah watunglawar, samponu, laian, melsasail, malisngarosa, batlasyeri silai, batlayeri marumat, lartutul, refwalu, snyomwain, samampun silai, samampun marumat.
4. Soa waram maselebun, dengan suku : nefanngelfan, kelanar, omtufwar, slarwan, temer dengan mata rumah Markindo, sermatan, fadirsyair, kempirmase, fenyempwain, syeramwain, ngilamelle, ranmelle, buarlely, saikmat, klise.

Inue tuturesi, marganya terdiri dari satu soa yaitu :

Fanumbi dengan nama sukunya ; awean, nifmasar, ibyarwar, batnerar, onditi mbanenar dengan nama rumahnya ; remase, maskikil, batbual, sarbunan, yempormase, batsire, karyain, somarwain, batfutbon, tormyar, beay.

Inue lakateru, marga – marganya terdiri dari suku lakateru, barito, ranratu, rangkore, laratmase dan batmomolin.

Inue kewali, marga – marganya terdiri dari suku kewali mata rumahnya driti.

Inue mpotian wain, terbentuk pertama kali oleh salah seorang yang bernama metaniat yang berasal dari mata rumah kelbulan. Awalnya moyang ini menanam sejenis gandum yang dikenal dengan nama mpotan di sebuah tempat yang kini dikenal dengan nama kampong purba Olilit. Beliau berusaha untuk menggabungkan seluruh soanya futwembun, dan akhirnya bergabung juga soa futwembun, ivakdalam dan wananmaselebun.

Dalam ceritanya putra moyang waranmaselebun yang bernama Nifangelyaw dan waranfameren tinggal di dalam istana batu, yang kalau pintunya di buka dan di tutup bunyinya kedengaran sampai selaru, molu dan maru. Hal inilah yang membuat semua suku – suku mulai berdatangan ke inue Mpotanain.

Datanglah idde dari masyarakat Mpotanwain untuk menggabungkan diri dengan 3 inue lain yaitu : tutunresi. Inue tutunresi bersedia bergabung dengan marga fanumbi naik ke Mpotamwain untuk bergabung. Atas prakasa dua kampong gabungan ini maka mereka membujuk inue kewali untuk bergabung. Namun kewali tidak mau, maka seluruh penduduknya dibawah dan bangsawannya yang bernama

Ngolbie di bawah ke Mpotamwain. Setelah 3 inue ini bergabung maka mereka merencanakan untuk minta inue lakateru bergabung. Namun inue lakateru tidak mau bergabung, maka bangsawannya yang bernama Mailemloryae lari meninggalkan lakateru ke laruleu dan bangsawan yang bernama kabunin lari ke lermatang. Setelah empat inue kecil ini bergabung di daerah Mpotamwain maka mereka merencanakan untuk menggabungkan nama Mpotamwain ini menjadi sebuah nama inue baru yang disegani dan ditakuti di kepulauan tanimbar ini. Semua kepala suku dari marga – marganya di suruh mencari kepala manusia untuk memperkokoh nama kampung yang baru.

Mereka menyebar ke mana – mana untuk memperkenalkan nama kampung barunya ini dengan nyanyian am lilit yamdema ooo sariama de. Yang artinya : kami sudah keliling (melilit) pulau yamdema maka kami perkenalkan nama inue baru dengan nama OLILIT.

Karena iri hati kampung – kampung tetangga terhadap nama olilit, maka timbul dendam dari kampung – kampung itu. Di Tahun 1887, pecahlah perang antara olilit dan gabungan 12 desa tetangga yang dipimpin oleh desa lorulun dengan panglimanya yang bernama Abwaraman. Keluar sebagai pemenang adalah olilit sehingga sampai saat ini Olilit ditakuti dan disegani oleh seluruh desa di kepulauan tanimbar.

Begitu pula tindakan mereka dalam suatu tatanan adat tanimbar dengan pemerintahan di susun dalam sebuah lingkaran yang di duduki oleh 10 batu adat dengan bersemboyan NGRIMASE (kata emas).

Terdapat tiga trisaktinya yakni :

1. Tal dol lan lesa, tolda lan lesa
2. Mfair len dim ampalweran na da mabuburoat na dol
3. Tal dol nanat monuk, told a nanak monuk, talda nmmat monule

Sebagai pemegang kekuasaan maka tiga batu adat yang sama luasnya yaitu :

1. Mangafwayak (juru pemutus dan menyiar)
2. Mangsompe (pembawa tukang kebun) dan
3. Inue druan (tuan kampung)

Pemerintah desa secara adat di pegang oleh Tamat Aboyaman pada Tahun 1902. Pemerintahan ini berlangsung sampai dengan agaman katolik masuk ke kampung purba olilit di Tahun 1910 dan saat itu tanati Aboyaman menjadi kepala inue (penguasa desa)

Pada Tahun 1914 oleh Gesacheber kroome, Tanati Aboyaman di beri tongkat pemerintahan desa yang pertama dengan nama **ORANG KAYA OLILIT** .

Pada Tahun 1908 belanda mulai menanam kukunya di olilit dengan mendirikan sebuah gubuk (befak), tentara morsesse (tentara belanda) dan dipimpin oleh kopral yang bernama Takaria. Oleh pemuda olilit tentara morsesse (tentara belanda) dibunuh dan pemuda – pemuda olilit dibawwah ke ambon dan dipenjarakan selama 4 tahun.

Pada Tahun 1913 terjadi pemandian pertama di olilit dan sejak itu para misionaris mulai membuka sekolahnya di olilit dan alusi krawain.

Tahun 1918 masyarakat sudah mulai banyak dan kampung purba dan menetap di olilit lama (olilit timur) sekarang.

Pada tahun 1948, akibat dari penduduk kota saumlaki mulai berdatangan dan banyak membuat ulah disekitar teluk saumlaki, maka oleh usul dari bapak guru kaitanus futwembun, kampung olilit harus dibagi menjadi dua yaitu sebagian besar ke olilit Barat untuk menjadi petuanan desa OLILIT BARAT/OLILIT BARU. 71 kepala keluarga mula – mula membuat rumah di olilit barat dan berkembang sampai sekarang ini.

Data tabel berikut akan disajikan keadaan penduduk berdasarkan kepercayaan yang dianut agama, di desa olilit kecamatan tanimbar selatan seluruh penduduknya adalah beragama Kristen. Untuk mengetahui tingkat penyebaran usia penduduk desa olilit seperti penulis sajukan dalam tabel berikut :

Tabel 4.1.**Data Penduduk Berdasarkan Golongan Usia Di Desa Olilit**

No	Golongan Usia	Jumlah	Presentase
1	0 – 15 Tahun	1484	0,63%
2	16 – 65 Tahun	2532	0,107%
3	66 Tahun ke atas	200	8.432%
Jumlah		4216	9.169%

Berdasarkan dalam tabel 4.1 di atas dapat diketahui bahwa penduduk di desa olilit kecamatan tanimbar selatan kabupaten kepulauan tanimbar yaitu penduduk yang termasuk dalam golongan usia 0 – 15 Tahun terdapat sebanyak 1.484 orang atau 1.484 %, kemudian yang berusia antara 15 – 65 Tahun sebanyak 2.532 orang atau 2.532%, sedangkan yang berusia 65 Tahun ke atas sebanyak 200 orang atau 200%.

Dalam tabel berikut disajikan kondisi penduduk di desa olilit berdasarkan pekerjaan atau mata pencaharian penduduk, yaitu :

Tabel 4.2.**Data Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan (Profesi) Di Desa Olilit**

No	pekerjaan	jumlah	presentase
1	Pegawai Negeri	56	2.361%
2	TNI/POLRI	35	1.476%
3	Karyawan swasta	28	1.181%
4	Wiraswasta/pedagang	115	4.849%
5	Tani/buruh tani	3312	139.634%
6	Pertukangan	212	8.938%
7	Pensiunan	27	1.139%
8	Penjahit	9	0.380%
9	Lain – lain	422	17.792%
Jumlah		4216	177.75%

Data dalam tabel 4.2 di atas dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk di desa olilit bermatapencaharian atau bekerja di sector pertanian. Secara jelas bahwa penduduk yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri sebanyak 56 orang atau 56%, penduduk yang berprofesi sebagai TNI/POLRI sebanyak 35 orang atau 35%, penduduk yang berprofesi sebagai karyawan swasta sebanyak 28 orang atau 28%, penduduk yang berprofesi sebagai wiraswasta/pedagang sebanyak 115 orang atau 115%, penduduk yang berprofesi sebagai Tani/buruh tani sebanyak 3312 orang atau 3312%, penduduk yang berprofesi sebagai pertukangan sebanyak 212 orang atau 212%, penduduk yang berprofesi sebagai pensiunan sebanyak 27 orang atau 27%, penduduk yang berprofesi sebagai penjahit sebanyak 9 orang atau 9%, sedangkan profesi penduduk yang lainnya sebanyak 422 orang atau 422%.

Untuk gambaran tentang tingkat pendidikan penduduk di desa olilit penulis sajikan dalam tabel 4.3 berikut ini :

Tabel 4.3

Data Penduduk Berdasarkan Jenjang Pendidikan Di Desa Olilit

No	Jenjang pendidikan	jumlah	presentase
1	Tidak bersekolah	97	4.089%
2	Belum sekolah	669	28.206%
3	TK	780	32.885%
4	SD	650	27.404%
5	SMP	825	34.782%
6	SMA/SMK	975	41.106%
7	S1/Magister	220	9.276%
	Jumlah	4216	115.459%

Sesuai dengan data tabel 4.3 di atas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan penduduk terdistribusi secara merata di berbagai tingkatan, secara

rinci jenjang pendidikan penduduk dimana penduduk yang tidak bersekolah sebanyak 97 orang atau 97%, penduduk yang belum bersekolah sebanyak 669 orang atau 669%, sedangkan penduduk yang menduduki tingkat TK sebanyak 780 orang atau 780%, kemudian di tingkat SD sebanyak 650 orang atau 650%, tingkat SMP sebanyak 825 orang atau 825%, tingkat SMA/SMK sebanyak 975 orang atau 975%, sedangkan untuk tingkat S1/Magister sebanyak 220 atau 220%.

4.1.2. Visi dan Misi Desa Olilit

Secara umum, pengertian Visi adalah pandangan jauh ke depan dari individu atau suatu organisasi, berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai, dan apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut di masa depan.

Berikut ini akan dipaparkan visi desa olilit kecamatan tanimbar selatan kabupaten kepulauan tanimbar :

4.1.2.1.Visi Desa Olilit

Visi adalah sebagai gambaran tentang kondisi ideal yang diinginkan atau yang dicita – citakan oleh pemerintah desa di masa yang akan datang, Visi juga merupakan alat bagi pemerintah desa dan pelaku pembangunan lainnya melihat, menilai atau member predikat terhadap kondisi desa yang diinginkan, adapun Visi Desa Olilit adalah sebagai berikut :

“ Mewujudkan mampu berkarya menuju desa yang sejahtera dan harmonis “

4.1.2.2. Misi Desa Olilit

Misi adalah suatu pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran desa yang hendak dicapai, pernyataan Misi membawa desa kepada suatu focus. Misi inilah yang harus di emban oleh pemerintah desa. Untuk mewujudkan Visi desa tersebut di atas, maka pemerintah desa olilit menettapkan Misi sebagai berikut :

1. Menumbuh kembangkan ajaran Agama, Budaya, dan budi pekerti.
2. Mengolah dan mengembangkan potensi sumber daya alam yang ada.
3. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kerja sama anatar lembaga adat serta lembaga lainnya
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sehingga dapat menumbuh kembangkan kesadaran dan kemandirian dalam pembangunan desa yang berkelanjutan.
5. Menciptakan suasana yang aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat.
6. Menciptakan lingkungan Desa Olilit sebagai Desa yang indah, nyaman, asri, dan lestari.

4.1.3. Kelembagaan Kantor Desa Olilit

4.1.3.1. Perangkat Kantor Desa Olilit

Dalam pelaksanaan pemerintah, pemerintah Desa Olilit terdiri dari kepala BPD yang derajadnya setara dengan Kepala Desa yang di bantu oleh sekretaris Desa dalam tugasnya dibantu oleh tiga kepala

urusan yakni kepala urusan (Kaur) Umum, kepala urusan (Kaur) Keuangan, dan kepala urusan (Kaur) Perencanaan. Serta dibantu ke tiga kepala seksi yaitu kepala seksi pemerintahan, kepala seksi kesejahteraan, dan kepala seksi pelayanan. Selain dari sekretaris dan kaur, serta kepala seksi, Kepala Desa juga tidak terlepas dari bantuan kepala Dusun dan masyarakat setempat yang ikut serta dalam pelaksanaan roda pemerintahan. Dalam mendukung kelancaran kegiatan operasional pelayanan di kantor desa olilit kecamatan tanimbar selatan kabupaten kepulauan tanimbar oleh 9 perangkat desa. Untuk lebih jelasnya, dalam tabel berikut akan disajikan data perangkat desa dengan berdasarkan pada jenis kelamin perangkat desa yang ada.

Tabel 4.4

Data Perangkat Desa Berdasarkan Kelamin

Kantor Desa Olilit Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang perangkat desa)
1	Laki – laki	9
2	perempuan	-
Jumlah		9

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui perangkat desa yang ada di kantor desa olilit seluruhnya berjenis kelamin laki – laki.

Kemudian data perangkat desa yang ada di kantor desa olilit berdasarkan tingkat pendidikan yang telah diselesaikan, data tersebut seperti yang penulis sajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.5
Data Perangkat Desa Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Kantor Desa Olilit Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan
Tanimbar

No	Tingkat Pendidikan Perangkat Desa	Jumlah (Orang Perangkat Desa)
1	SD	-
2	SMP	-
3	SMA/SMK	9
4	Sarjana (S1)	-
Jumlah		9

Berdasarkan tabel 4.4 dapat di ketahui bahwa tingkat pendidikan perangkat desa olilit rata – rata lulusan SMA/SMK.

4.1.3.2. Tugas Pokok dan Fungsi Keorganisasian

Berdasarkan peraturan bupati Nomor 3 Tahun 2018 tentang pedoman susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa, pemerintah desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsure penyelenggara pemerintah desa, sedangkan struktur organisasi desa olilit sebagai berikut :

1. Kepala Desa
2. Sekretaris Desa
3. Kepala Urusan Umum
4. Kepala Urusan Keuangan
5. Kepala Urusan Perencanaan
6. Kepala seksi pemerintahan
7. Kepala seksi kesejahteraan
8. Kepala seksi pelayanan

Organisasi adalah suatu system kerja sama dari kelompok orang untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi harus disusun berdasarkan pola yang jelas dalam pembagian tugas dan wewenang agar tidak terjadi keseimbangan tugas masing – masing. Berdasarkan pengertian tersebut, bahwa dengan adanya struktur organisasi, maka akan dapat diketahui adanya :

1. Hubungan antara satu bagian dengan bagian yang lain
2. Tugas dan tanggung jawab masing – masing bagian
3. Garis – garis kekuasaan atau wewenang masing – masing bagian
4. Dalam hubungan kelembagaan dikantor desa olilit, bagan keorganisasiannya dapat digambarkan sebagai berikut :

Berdasarkan struktur organisasi di atas, maka penjabaran tentang tugas pokok dan tugas fungsi dari masing – masing bagian dapat dijelaskan dalam bagian berikut ini :

1. Tugas pokok dan fungsi kepala desa

Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Sedangkan rincian tugas dan fungsi kepala desa adalah :

Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud, kepala desa mempunyai wewenang :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan bersama BPD
- b. Mengajukan rencana peraturan desa
- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD
- d. Membina kehidupan masyarakat desa
- e. Membina perekonomian desa
- f. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Secretariat desa berkedudukan sebagai unsure penunjang pemerintah desa yang dipimpin sekretaris desa.

2. Fungsi dan tugas sekretaris desa

Sekretaris desa mempunyai tugas menjalankan kegiatan administrasi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di desa serta memeberikan pelayanan administrtif kepada Kepala Desa. sekretaris desa mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan pelaporan
- b. Pelaksanaan administrasi pemerintahan meliputi administrasi pemerintahan/keagrariaan dan kependudukan
- c. Pelaksanaan adminstrasi pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat

d. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan kepala desa sesuai bidang tugasnya.

3. fungsi dan tugas kepala urusan umum

kepala urusan umum mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan administrasi umum, personil, perlengkapan dan urusan rumah tangga pemerintah desa. Untuk menjalankan tugasnya tersebut kepala urusan umum mempunyai fungsi :

- a. melakukan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh perangkat desa lainnya dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa secara terpadu.
- b. Mengumpulkan, menganalisa data dan merumuskan program serta petunjuk untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah desa
- c. Penyelenggaraan tata naskah dinas pemerintah desa
- d. Pelaksanaan penyimpanan, pemeliharaan, dan mengamankan arsip, dokumen milik desa, daftar hadir perangkat desa, dan memberikan pelayanan administrative pemerintah desa.
- e. Pengkoordinasian penyusunan naskah rancangan peraturan desa, peraturan kepala desa, keputusan kepala desa dan naskah dinas lainnya.

4. Fungsi dan tugas kepala urusan keuangan

Kepala urusan keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan administrasi keuangan dan sumber pendapatan desa. Untuk

menyelenggarakan tugas tersebut kepala urusan keuangan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan administrasi keuangan dan pelaksanaan fungsi bendahara desa
- b. Pelaksanaan, penyiapan bahan penyusunan rencana APBdes
- c. Pelaksanaan pencatatan penerimaan dan pengeluaran keuangan desa dalam buku kas umum dan buku kas pembantu
- d. Penyelenggara administrasi pembayaran belanja desa.

5. Fungsi dan tugas kepala seksi pemerintahan

Seksi pemerintahan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan dan administrasi pemerintahan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut seksi pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan administrasi dan kegiatan pelayanan bidang pertanahan (agraria)
- b. Pelaksanaan inventarisasi dan pencatatan administrasi pertanahan
- c. Penyimpanan dan pemeliharaan dokumen pertanahan/keagrariaan
- d. Penyelenggara administrasi dan pelayanan kependudukan dan catatan sipil
- e. Penyusunan monografi desa
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

6. Tugas pokok dan fungsi kepala seksi kesejahteraan

Seksi kesejahteraan mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi dan kegiatan dibidang kesejahteraan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut seksi kesejahteraan mempunyai fungsi :

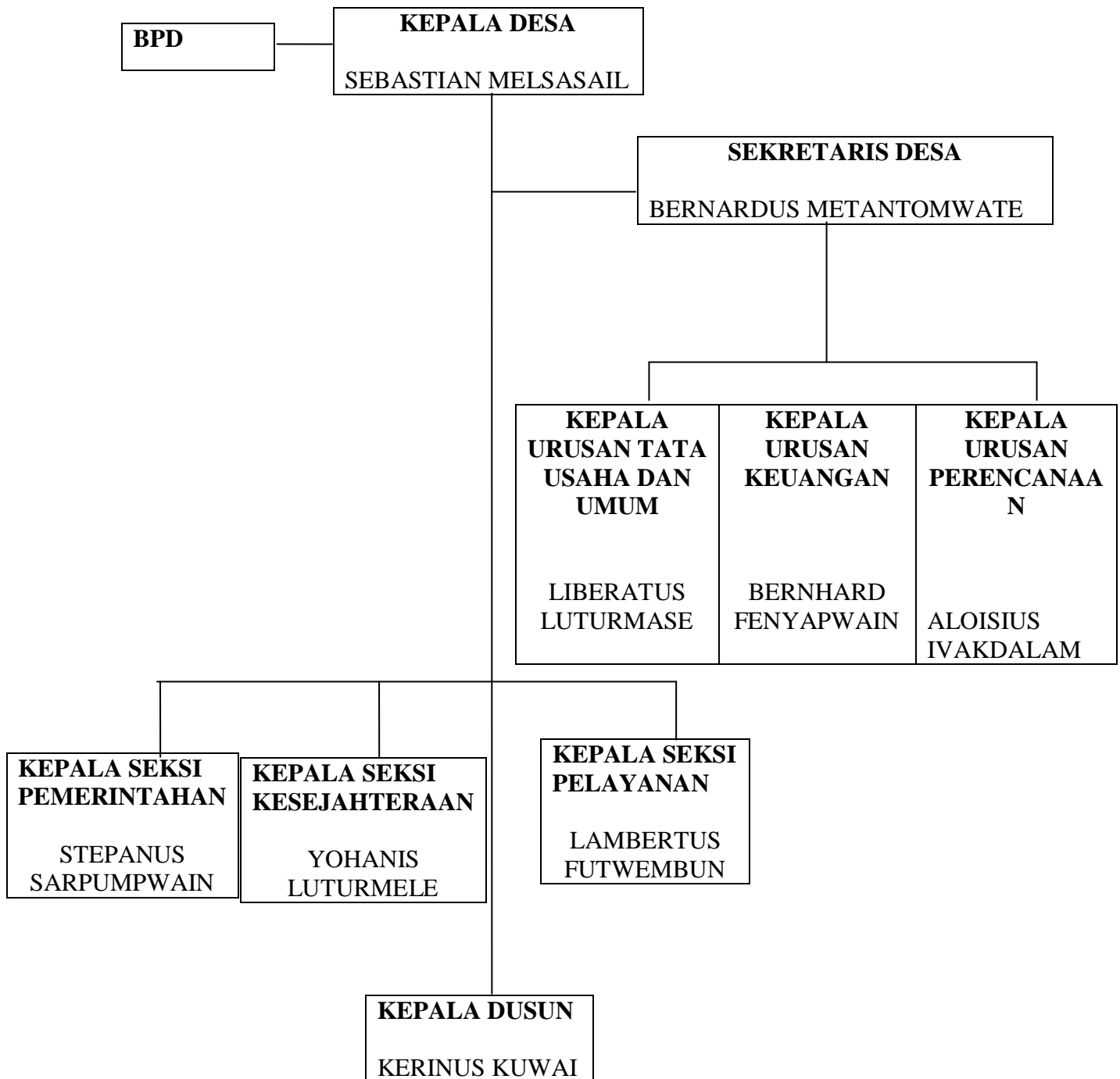
- a. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data di bidang kesejahteraan rakyat, agama, sosial dan budaya
- b. Pelaksanaan pembinaan dibidang pendidikan, kebudayaan tempat – tempat bersejarah, peningkatan kegiatan keluarga berencana, posyandu, kesehatan masyarakat, dan badan – badan sosial keagamaan.
- c. Pelaksanaan koordinasi pelayanan masyarakat di bidang keagamaan termasuk pencatatan pengurusan kematian dan NTCR (Nikah, Talak, Cerai, Rujuk)
- d. Pelaksanaan pembinaan dan pengkoordinasian kegiatan – kegiatan sosial kemasyarakatan di desa
- e. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh kepala desa

7. Tugas dan fungsi kepala seksi pelayanan

Kepala seksi pelayanan bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksanaan tugas operasional. Untuk melaksanakan tugas kepala seksi pelayanan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat
- b. Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Desa Olilit



4.2. Hasil Penelitian

4.2.1. Deskripsi Responden

4.2.2. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Umur Responden

Untuk melihat tentang umur responden sesuai dengan hasil yang diperoleh dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.6.

Frekuensi Tingkat Umur Responden

Dari tabel 4 dapat di ketahui bahwa tingkat umur responden pada usia 34

Tahun sampai 50 Tahun sebanyak 25 orang atau 10 %, sedangkan usia 51 Tahun

ke atas

NO	UMUR	F	%
1	34– 50	25	10 %
2	5 1 Ke Atas	15	6 %
	TOTAL	40	16%

sebanyak 15 orang atau 6 %.

4.2.3. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Responden

Untuk melihat tentang jenis kelamin responden sesuai dengan hasil penelitian yang diperoleh dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 4.7.

Frekuensi Jenis Kelamin Responden

NO	JENIS KELAMIN	F	%
1	Laki – laki	29	11,6 %
2	Perempuan	11	4,4 %
	TOTAL	40	16%

Data tabel di atas menunjukkan bahwa dari 40 responden, sebanyak 29 orang atau 11,6 % adalah laki – laki, dan sebanyak 11 orang atau 4,4 % adalah perempuan.

4.2.4. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berikut ini adalah deskripsi jenjang pendidikan responden berdasarkan hasil pengumpulan kuisioner.

Tabel 4.8.
Frekuensi Tingkat Pendidikan Responden

NO	PENDIDIKAN	F	%
1	SD	5	2 %
2	SMP	15	6 %
3	SMA/SMK	18	7,2 %
4	SARJANA	2	0,8 %
	TOTAL	40	16%

Dari tabel 6 di atas dapat diketahui jenjang pendidikan responden adalah lulusan SD sebanyak 5 orang atau 2%, urutan berikutnya adalah lulusan SMP sebanyak 15 orang atau 6%, kemudian lulusan SMA/SMK sebanyak 18 orang atau 7,2%, sedangkan lulusan sarjana sebanyak 2 orang atau 0,8%.

4.2.5 Uji Validitas Instrumen Penelitian

Suatu instrument dikatakan memiliki validitas yang tinggi apabila instrument tersebut dapat menjalankan fungsi ukurannya. Atau memberikan hasil ukur yang tepat dan akurat sesuai dengan maksud dikenakannya instrument tersebut. Pengukuran validitas pada instrument ini dilakukan dengan korelasi *product moment* antara skor butir dengan skor total. Koefisien korelasi dapat dianggap memuaskan jika melebihi 0.30. (Azwar : 1998 : 153).

Hasil pengukuran validitas instrument penelitian diperoleh hasil r hitung (*pearson correlation*) seperti yang disajikan dalam tabel berikut :

Tabel .4.9.
Nilai Uji Validitas Instrumen Penelitian

Variabel	Indikator	<i>Pearson Correlation</i>	Tolak Ukur Minimal	Keterangan
Perencanaan (X₁)	1. Penetapan tujuan	0.602	0.30	Valid
	2. Alternative	0.795		
	3. Sumber yang diperlukan	0.724		
Pelaksanaan (X₂)	1. Akses	0.682	0.30	Valid
	2. Akuntabilitas	0.567		
	3. Kesesuaian program dan kebutuhan	0.365		
Pengawasan (X₃)	1. Penetapan standar	0.741	0.30	Valid
	2. Penentuan pengukuran/penilaian kerja	0.841		
	3. Pengukuran pelaksanaan kinerja	0.901		
	4. Perbaikan atas penyimpangan	0.512		
Pembangunan (Y)	1. Kondisi dan taraf hidup masyarakat	0.717	0.30	Valid
	2. Partisipasi masyarakat	0.717		

Sumber :Lampiran 3

Berdasarkan pada tabel 4.4.di atas, menunjukkan bahwa nilai r hitung (koefisien korelasi) lebih besar dari 0.30, dengan demikian bahwa instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur variabel dapat dikatakan valid.

4.2.6. Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian

Uji reliabilitas digunakan untuk menguji sejauh mana suatu alat ukur dipakai dua kali atau lebih. Maka untuk mengukur gejala yang sama akan menghasilkan pengukuran yang diperoleh relatif konsisten. Dengan kata lain *reliabilitas* menunjukkan konsistensi suatu alat ukur dalam mengukur gejala yang sama.

Pengukuran yang memiliki *reliabilitas* tinggi, yaitu yang mampu memberikan hasil ukur yang terpercaya.Pada penelitian ini digunakan uji *reliabilitas* dengan metode *alpha cronbach*.Jika koefisien Cranbach alpha sebesar 0,6 atau lebih, maka instrumen penelitian tersebut dapat dikatakan reliabel (Hadi.1999).
pengukuran uji reliabilitas diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel. 4.10.
Nilai Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian

No	Variabel Penelitian	Nilai Alpha Crobach	Tolak Ukur Minimal	Keterangan
1	Perencanaan (X_1)	0.825	0.6	Reliabel
2	Pelaksanaan (X_2)	0.708	0.6	Reliabel
3	Pengawasan (X_3)	0.880	0.6	Reliabel
4	Pembangunan (Y)	0.817	0.6	Reliabel

Sumber :*Lampiran 3*

Berdasarkan tabel di atas nilai alpha cronbach dari masing – masing variable lebih dari 0.6 sehingga dapat dikatakan bahwa semua item – item dalam kuisisioner penelitian tersebut adalah reliable (andal).

4.2.7. Diskripsi Frekuensi Skor Indikator Variabel Penelitian

Diskripsi frekuensi skor indicator variable penelitian merupakan analisis diskripsi tentang jawaban responden terhadap pernyataan – pernyataan yang disajikan dalam kuisisioner sebagai indicator pengukuran variable penelitian. Untuk mengetahui baik tidaknya kondisi variable penelitian, dengan didasarkan pada nilai rata – rata mean yang kemudian dilakukan standarisasi pengkategorian dengan mengacu pada indicator rentang pengukuran nilai yang dikemukakan oleh Nadsir (1999), apabila nilai rata – rata berada pada rentang nilai :

- < 2.50 Termasuk dalam kategori Kurang
- 2.51 – 3.00 Termasuk dalam kategori Cukup
- 3.01 – 3.50 Termasuk dalam kategori Baik
- >3.51 Termasuk dalam kategori Sangat Baik

Adapun hasil distribusi frekuensi skor indicator variable penelitian seperti yang tersaji dalam tabel berikut ini :

1. Distribusi Frekuensi Skor Indikator Perencanaan (X_1)

Berikut tanggapan responden tentang Perencanaan yang di paparkan oleh perangkat desa. Kepada responden terdapat 3 (tiga) pernyataan dan diperoleh distribusi frekuensi skor indicator variable seperti dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.11.

Deskripsi Indikator Variabel Perencanaan (X_1)

Indikator Variabel	Skor indicator					Σ Skor	Mean
	a	b	c	d	e		
	5	4	3	2	1		
1. Penetapan maksud dan tujuan	-	2	16	22	-	40	2.50
2. Penetapan Alternative	-	8	16	15	1	40	2.78
3. Pengaturan Sumber yang diperlukan	2	11	14	12	1	40	3.03
Jumlah	2	21	46	49	2		8.31
Presentase	0,8	8,4	18,4	19,6	0,8	40	-
Rata – rata Mean							2.77

Sumber :*Lampiran 4*

Hasil distribusi dalam tabel 4.11 di atas menunjukkan bahwa dari 40 orang responden yang memberikan jawaban atas beberapa pertanyaan sebagai indikator pengukuran variable Perencanaan (X_1) di dapat bahwa untuk responden yang memilih alternative jawaban (a) terdapat sebesar 0,8% responden dengan alternative jawaban (b) sebesar 8,4% kemudian untuk alternative jawaban (c) sebesar 18,4% dan responden yang memilih alternative jawaban (d) terdapat sebesar 19,6% sedangkan yang memilih alternative jawaban (e) sebesar 0,8%.

Berdasarkan hasil tersebut bahwa responden sebagian besar memilih alternative jawaban (d). Sedangkan berdasarkan nilai rata – rata mean yang didapat yaitu sebesar 2.77, besarnya nilai rata – rata tersebut termasuk dalam rentang nilai antara 2.51 – 3.00 yang berarti termasuk dalam kategori Cukup. Berdasarkan hasil tersebut maka Perencanaan termasuk dalam kategori Cukup.

2. Distribusi Frekuensi Skor Indikator Pelaksanaan (X₂)

Tanggapan responden tentang Pelaksanaan. Kepada responden terdapat 3 (tiga) pernyataan dan diperoleh distribusi frekuensi skor indicator variable seperti dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.12.

Deskripsi Indikator Variabel Pelaksanaan (X₂)

Indicator Variabel	Skor indicator					Σ Skor	Mean
	a	b	c	D	e		
	5	4	3	2	1		
1. Akses	-	16	17	7	-	40	3.23
2. Akuntabilitas	3	16	14	7	-	40	3.38
3. Kesesuaian program dan kebutuhan	11	22	6	1	-	40	4.08
Jumlah	14	54	37	15	-	120	10.69
Presentase	5,6	21,6	14,8	6	-	40	-
Rata – rata Mean							3.57

Sumber :*Lampiran 4*

Hasil distribusi dalam tabel 4.12 di atas menunjukkan bahwa dari 40 orang responden yang memberikan jawaban atas beberapa pertanyaan sebagai indikator pengukuran variable Pelaksanaan (X₂) di dapat bahwa untuk responden yang memilih alternative jawaban (a) terdapat sebesar 5,6% responden dengan alternative jawaban (b) sebesar 21,6% kemudian untuk alternative jawaban (c)

sebesar 14,8% dan responden yang memilih alternative jawaban (d) terdapat sebesar 6% sedangkan yang memilih alternative jawaban (e) sebesar 0%. Berdasarkan hasil tersebut bahwa responden sebagian besar memilih alternative jawaban (b). Sedangkan berdasarkan nilai rata – rata mean yang didapat yaitu sebesar 3.57. besarnya nilai rata – rata tersebut termasuk dalam rentang nilai antara >3.51 yang berarti termasuk dalam kategori sangat baik. Berdasarkan hasil tersebut maka Pelaksanaan termasuk dalam kategori sangat baik.

3. Distribusi Frekuensi Skor Indikator Pengawasan (X₃)

Tanggapan responden tentang Pelaksanaan. Kepada responden terdapat 4 (empat) pernyataan dan diperoleh distribusi frekuensi skor indicator variable seperti dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.13.

Deskripsi Indikator Variabel Pengawasan (X₃)

Indikator Variabel	Skor indicator					Σ Skor	Mean
	a	b	c	D	e		
	5	4	3	2	1		
1. Penetapan standar	1	11	13	15	-	40	2.95
2. Penentuan pengukuran/penilaian kerja	-	12	15	12	1	40	2.95
3. Pengukuran pelaksanaan kinerja	-	14	13	12	1	40	3.00
4. Perbaikan atas penyimpangan	-	20	17	3	-	40	3.43
Jumlah	1	57	58	42	2	160	12.33
Presentase	0,4	22,8	23,2	16,8	0,8	40	-
Rata – rata Mean							3.825

Sumber :Lampiran 4

Hasil distribusi dalam tabel 4.13 di atas menunjukkan bahwa dari 40 orang responden yang memberikan jawaban atas beberapa pertanyaan sebagai

indicator pengukuran variable Pengawasan (X_3) di dapat bahwa untuk responden yang memilih alternative jawaban (a) terdapat sebesar 0,4% responden dengan alternative jawaban (b) sebesar 22,8% kemudian untuk alternative jawaban (c) sebesar 23,2% dan responden yang memilih alternative jawaban (d) terdapat sebesar 16,8% sedangkan yang memilih alternative jawaban (e) sebesar 0,8%. Berdasarkan hasil tersebut bahwa responden sebagian besar memilih alternative jawaban (c). Sedangkan berdasarkan nilai rata – rata mean yang didapat yaitu sebesar 3.825. besarnya nilai rata – rata tersebut termasuk dalam rentang nilai antara >3.51 yang berarti termasuk dalam kategori sangat baik. Berdasarkan hasil tersebut maka Pengawasan termasuk dalam kategori sangat baik.

4. Distribusi Frekuensi Skor Indikator keberhasilan Pembangunan (Y)

Kemudian Tanggapan responden tentang Pelaksanaan. Kepada responden terdapat 2(dua) pernyataan dan diperoleh distribusi frekuensi skor indicator variable seperti dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.14.

Deskripsi Indikator Variabel Keberhasilan Pembangunan(Y)

Indicator Variabel	Skor indikator					Σ Skor	Mean
	A	b	c	D	e		
	5	4	3	2	1		
1. Kondisi dan taraf hidup masyarakat	1	11	9	16	3	40	2.78
2. Partisipasi masyarakat.	-	3	9	23	5	40	2.25
Jumlah	1	14	18	39	8	80	5.03
Presentase	0,4	5,6	7,2	15,6	3,2	40	-
Rata – rata Mean							2.515

Sumber :*Lampiran 4*

Hasil distribusi dalam tabel 4.14 di atas menunjukkan bahwa dari 40 orang responden yang memberikan jawaban atas beberapa pertanyaan sebagai indikator pengukuran variable Pembangunan (Y) di dapat bahwa untuk responden yang memilih alternative jawaban (a) terdapat sebesar 0,4% responden dengan alternative jawaban (b) sebesar 5,6% kemudian untuk alternative jawaban (c) sebesar 7,2% dan responden yang memilih alternative jawaban (d) terdapat sebesar 15,6% sedangkan yang memilih alternative jawaban (e) sebesar 3,2%. Berdasarkan hasil tersebut bahwa responden sebagian besar memilih alternative jawaban (d). Sedangkan berdasarkan nilai rata – rata mean yang didapat yaitu sebesar 2.515.besarnya nilai rata – rata tersebut termasuk dalam rentang nilai antara >3.51 yang berarti termasuk dalam kategori sangat baik. Berdasarkan hasil tersebut maka keberhasilan Pembangunan termasuk dalam kategori sangat baik.

4.2.8. Analisis Regresi Linier Berganda

Table 4.15

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
	(Constant)	1.302	1.337		1.074	.037
1	X1	.143	.203	.175	.802	.027
	X2	.178	.162	.187	.866	.010
	X3	.299	.164	.500	1.927	.046

a. Dependent Variable: Y

Sumber :Lampiran 5

Sesuai dengan model analisis yang digunakan, yaitu regresi linier berganda, maka dapat dilakukan analisis dengan rumus :

$$Y = a + bx_1 + bx_2 + bx_3$$

Sehingga diperoleh nilai koefisien regresi sebagai berikut :

$$Y = 1.302 + 0.143 (X_1) + 0.178 (X_2) + 0.299 (X_3)$$

Nilai – nilai koefisien regresi linier berganda dari persamaan di atas terdapat pengertian sebagai berikut :

1. a (konstanta) = 1.302, mempunyai pengertian bahwa jika nilai factor perencanaan (X₁), pelaksanaan (X₂), dan pengawasan (X₃) sama dengan nol, maka keberhasilan pembangunan (Y) di Desa Olilit Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar adalah sebesar 1.302.
2. X₁ = 0.143, mempunyai pengertian bahwa setiap peningkatan nilai factor perencanaan (X₁) sebesar satu satuan, maka akan mengakibatkan perubahan dengan arah yang sama terhadap keberhasilan Pembangunan (Y) di Desa Olilit Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebesar 0.143.
3. X₂ = 0.178, mempunyai pengertian bahwa setiap peningkatan nilai factor pelaksanaan (X₂) sebesar satu satuan, maka akan mengakibatkan perubahan dengan arah yang sama terhadap keberhasilan Pembangunan (Y) di Desa Olilit Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebesar 0.178. sedangkan
4. X₃ = 0.299, mempunyai pengertian bahwa setiap peningkatan nilai factor pengawasan (X₃) sebesar satu satuan, maka akan mengakibatkan

perubahan dengan arah yang sama terhadap keberhasilan Pembangunan (Y) di Desa Olilit Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebesar 0.299.

4.2.9. Analisis Koefisien Korelasi (R^2)

Tabel 4.16

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.583 ^a	.340	.285	1.413

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

Berdasarkan table 4.16 di atas diperoleh nilai dari koefisien korelasi (R^2) adalah sebesar 0,340. Dengan nilai koefisien (R^2) sebesar 0,340, menunjukkan keeratan hubungan antara variable bebas dengan variable terikat, karena nilai dari koefisien korelasi (R^2) yang diperoleh mempunyai derajat keeratannya sangat kuat karena mendekati nilai 1. Sedangkan tanda koefisien regresi linier yang positif menandakan hubungan yang terjadi searah, yang artinya semakin meningkatnya nilai factor perencanaan (X1), pelaksanaan (X2), dan pengawasan (X3)., maka keberhasilan pembangunan di Desa Olilit Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar juga akan mengalami peningkatan.

4.2.10. Pengujian Hipotesis

4.2.11. Uji t

Dari hasil pengolahan SPSS dapat diketahui koefisien – koefisien yang digunakan untuk membuktikan kebenarannya dari hipotesis yang diajukan dengan menggunakan uji t, dasar pengujian hipotesis penelitian adalah :

1. Jika nilai signifikansi $< 0,05$, maka terdapat pengaruh yang signifikan antara variable Perencanaan (X_1), Pelaksanaan (X_2), dan Pengawasan (X_3) Terhadap keberhasilan Pembangunan (Y) Desa Olilit Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
2. Jika nilai signifikansi $> 0,05$, maka tidak ada pengaruh yang signifikan antara variable Perencanaan (X_1), Pelaksanaan (X_2), dan Pengawasan (X_3) Terhadap keberhasilan pembangunan (Y) Desa Olilit Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

1. Variable perencanaan (X_1)

Hasil pengujian hipotesis secara parsial diperoleh nilai signifikan untuk t hitung untuk variable Perencanaan (X_1) sebesar 0.802, nilai signifikansi sebesar 0.027 jadi nilai signifikansi lebih kecil dari nilai 0,05 ($0.027 < 0,05$). Berdasarkan hasil tersebut, maka hipotesis di terima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan Pembangunan di Desa Olilit Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

2. Variable Pelaksanaan (X_2)

Hasil pengujian hipotesis secara parsial diperoleh nilai signifikan untuk t hitung untuk variable Pelaksanaan (X_2) sebesar 0.866, nilai signifikansi sebesar 0.010 jadi nilai signifikansi lebih kecil dari nilai 0,05 ($0.010 < 0,05$). Berdasarkan hasil tersebut, maka hipotesis di terima, artinya terdapat

pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan Pembangunan di Desa Olilit Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

3. Variable Pengawasan (X_3)

Hasil pengujian hipotesis secara parsial diperoleh nilai signifikan untuk t hitung untuk variable Pengawasan (X_3) sebesar 1.927, nilai signifikansi sebesar 0.046 jadi nilai signifikansi lebih kecil dari nilai 0,05 ($0.046 < 0,05$). Berdasarkan hasil tersebut, maka hipotesis di terima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan Pembangunan di Desa Olilit Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

4.2.12. Uji F

Dari hasil pengolahan SPSS dapat diketahui koefisien – koefisien yang digunakan untuk membuktikan kebenarannya dari hipotesis yang diajukan dengan menggunakan uji f :

Hasil pengujian hipotesis secara simultan diperoleh nilai signifikan untuk f hitung untuk Seluruh Variabel (Perencanaan (X_1), Pelaksanaan (X_2), dan Pengawasan (X_3)) sebesar 6.190 , nilai signifikansi sebesar 0.002 jadi nilai signifikansi lebih kecil dari nilai 0,05 ($0.002 < 0,05$). Berdasarkan hasil tersebut, maka hipotesis di terima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap keberhasilan Pembangunan di Desa Olilit Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

4.3. Pembahasan Hasil Penelitian

Pembahasan hasil penelitian adalah suatu penegasan dan sekaligus pembenaran atas hasil suatu penelitian. Berdasarkan hasil distribusi skor alternative jawaban responden untuk indicator pengukuran Variabel Perencanaan dengan pencapaian prosentase untuk alternative jawaban Sangat setuju dengan pernyataan yang disampaikan yaitu sebesar 19,6% %, sedangkan untuk mengukur dan mengetahui tentang Perencanaan ditunjukkan oleh rata – rata nilai mean variable yang didapat yaitu sebesar 2.77, besarnya nilai rata – rata tersebut termasuk dalam rentang nilai antara 2.51 – 3.00 yang berarti termasuk dalam kategori Cukup. Berdasarkan hasil distribusi skor alternative jawaban responden untuk indicator pengukuran Variabel Pelaksanaan dengan pencapaian prosentase untuk alternative jawaban Sangat setuju dengan pernyataan yang disampaikan yaitu sebesar 21,6%, sedangkan untuk mengukur dan mengetahui tentang Pelaksanaan ditunjukkan oleh rata – rata nilai mean variable yang didapat yaitu sebesar 3.57, besarnya nilai rata – rata tersebut termasuk dalam rentang nilai antara >3.51 yang berarti termasuk dalam kategori sangat baik. Sedangkan hasil distribusi skor alternative jawaban responden untuk indicator pengukuran Variabel Pengawasan dengan pencapaian prosentase untuk alternative jawaban Sangat setuju dengan pernyataan yang disampaikan yaitu sebesar 23,2%, sedangkan untuk mengukur dan mengetahui tentang Pengawasan ditunjukkan oleh rata – rata nilai mean variable yang didapat yaitu sebesar 3.825, besarnya nilai rata – rata tersebut termasuk dalam rentang nilai antara >3.51 yang berarti termasuk dalam kategori sangat baik. Berdasarkan hasil tersebut maka Perencanaan, pelaksanaan, dan

pengawasan Pembangunan di Desa Olilit Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar dapat dikatakan Baik. Sedangkan hasil koefisien regresi untuk variable perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pembangunan Desa di Desa Olilit Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebesar 0.143, 0.178, dan 0.299. Besarnya nilai koefisien regresi yang bertanda positif menunjukkan bahwa pengaruh variable Perencanaan, Pelaksanaan, dan pengawasan terhadap keberhasilan pembangunan Desa di Desa Olilit Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar ada pengaruh positif, yang artinya setiap terjadi kenaikan satu unit skor Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan maka akan diikuti dengan meningkatnya pembangunan Desa Di Desa Olilit Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebesar 0.143, 0.178, dan 0.299 pada konstanta 1.302. Dengan demikian dapat diketahui bahwa pelaksanaan pembangunan Desa di Desa Olilit Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar dapat terlaksana dengan baik apabila didukung oleh program perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sesuai dengan kebutuhan dan program pembangunan di Desa Olilit Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pengujian hipotesis dalam bab sebelumnya, maka kesimpulan yang didapat adalah :

A. Secara Parsial

1. Variable perencanaan (X_1)

Hasil pengujian hipotesis secara parsial diperoleh nilai signifikan sebesar 0.027 jadi nilai signifikansi lebih kecil dari nilai 0,05 ($0.027 < 0,05$). Berdasarkan hasil tersebut, dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan Pembangunan di Desa Olilit Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

2. Variable Pelaksanaan (X_2)

Hasil pengujian hipotesis secara parsial diperoleh nilai signifikan sebesar 0.010 jadi nilai signifikansi lebih kecil dari nilai 0,05 ($0.010 < 0,05$). Berdasarkan hasil tersebut, dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan Pembangunan di Desa Olilit Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

3. Variable Pengawasan (X_3)

Hasil pengujian hipotesis secara parsial diperoleh nilai signifikan sebesar 0.046 jadi nilai signifikansi lebih kecil dari nilai 0,05 ($0.046 < 0,05$). Berdasarkan hasil tersebut, dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan Pembangunan di Desa Olilit Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

B. Secara Simultan

Hasil pengujian hipotesis secara simultan diperoleh nilai signifikan untuk Seluruh Variabel (Perencanaan (X_1), Pelaksanaan (X_2), dan Pengawasan (X_3)) sebesar 6.190 , nilai signifikansi sebesar 0.002 jadi nilai signifikansi lebih kecil dari nilai 0,05 ($0.002 < 0,05$). Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap keberhasilan Pembangunan di Desa Olilit Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

5.2 Saran

Untuk menyempurnakan program bantuan pelaksanaan pembangunan partisipatif, disarankan untuk melakukan upaya – upaya, yakni :

Dalam penentuan besarnya bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam bentuk bantuan Dana Desa (DD) ditambah dengan Pendapatan Asli Desa (PADes), diharuskan memperhatikan indicator – indicator antara lain : Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah.

Dengan mendasar kepada beberapa indicator di atas maka dapat menentukan besaran dana yang diterima masing – masing desa dengan perhitungan baik secara prosentatif (diprioritaskan) maupun scoring. Hal ini untuk menjamin asas keadilan antar desa sesuai kondisi rill.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Hartoyo dkk 1986 Buku, materi pokok pembangunan masyarakat desa

M.N.Azmy Achir Drs.keu Dosen institut ilmu keuangan jakarta Buku, masalah pengurusan keuangan Negara

Marselina ara lili 2018, pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dalam upaya meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat di desa magmagan karya kecamatan lumar

Okta rosalinda LPD 2014, pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dalam penunjang pembangunan pedesaan di desa sedorejo dan desa plosokerep, kecamatan sumobito, kabupaten jombang

Prof.Dr.Moeljarto T.,MPA 1987 Buku, Politik pembangunan, sebuah analisis konsep, arah dan strategi

Slamet hariyanto, dampak kebijakan alokasi dana desa (ADD) terhadap pembangunan desa di kabupaten bulungan tahun 2011-2014

Internet :

<http://legalstudies71.blogspot.com/2016/03/pengertian-pengawasan-menurut-para-ahli.html>

<https://www.pelajaran.id/2018/10/14-pengertian-pengawasan-menurut-para-ahli-terlengkap.html>

<https://www.dosenpendidikan.com/21-pengertian-pembangunan-menurut-para-ahli-terlengkap/>

<http://repository.uin-suska.ac.id/4201/3/BAB%20II.pdf>

<https://rifcur146.wordpress.com>

[http://repo.unsrat.ac.id/501/1/Kualitas Sumberdaya Manusia Hubungannya Dengan Keberhasilan Pembangunan Desa.pdf](http://repo.unsrat.ac.id/501/1/Kualitas_Sumberdaya_Manusia_Hubungannya_Dengan_Keberhasilan_Pembangunan_Desa.pdf)

<https://idtesis.com/teori-lengkap-implementasi-kebijakan-di-desa-menurut-para-ahli-dan-contoh-tesis-implementasi-kebijakan-di-desa/>

Skripsi :

Tutik masusiana.2015.Hubungan antara alokasi dana desa dengan pelaksanaan pembangunan Desa di Desa Sedagaran Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik.

Kuesioner Penelitian

Dengan hormat,

Dengan ini Saya mohon keikhlasan Bapak/ Ibu untuk dapat berpartisipasi dalam pengisian kuisisioner ini, besar harapan Saya dapat memperoleh data sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Kuisisioner ini dimaksudkan untuk mendapatkan data dalam rangka penelitian untuk penyusunan skripsi yang berjudul :

**“ PENGARUH PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TERHADAP
KEBERHASILAN PEMBANGUNAN DI DESA OLILIT KECAMATAN
TANIMBAR SELATAN KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR “**

Skripsi ini sebagai salah satu syarat dalam mencapai Gelar Sarjana S1 Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Administrasi Publik Universitas Wijaya Putra Surabaya. Atas Partisipasi Bapak / Ibu Saya ucapkan banyak terimakasih.

Hormat Saya

Yohana Kostansia Luturmase
15031027

Identitas Responden :

- ❖ Umur : ...
- ❖ Pendidikan : ...
- ❖ Jenis Kelamin : ...

Berikan tanda (contreng/centang) pada kolom alternative jawaban yang Anda anggap paling sesuai.

✓ **Perencanaan (X₁) :**

1. Penetapan maksud dan tujuan yang disampaikan oleh perangkat Desa menyangkut kesejahteraan masyarakat dalam Pembangunan yang di paparkan dengan baik dan dapat di pahami masyarakat dengan baik.

- a. Sangat Setuju d. Tidak Setuju
- b. Setuju e. Sangat Tidak Setuju
- c. Kurang Setuju

2. Factor – factor yang akan di hadapi oleh perangkat desa serta masyarakat telah dipertimbangkan bersama termasuk factor waktu yang merupakan salah satu alternative dan harus diperhitungkan dalam mengelola Alokasi Dana Desa terhadap Pelaksanaan Pembangunan.

- a. Sangat Setuju d. Tidak Setuju
- b. Setuju e. Sangat Tidak Setuju
- c. Kurang Setuju

3. Pengaturan sumber yang diperlukan terkait jalannya pembangunan telah dipersiapkan dengan baik.

- a. Sangat Setuju d. Tidak Setuju
- b. Setuju e. Sangat Tidak Setuju
- c. Kurang Setuju

✓ **Pelaksanaan X₂**

1. Sarana dan prasarana untuk kebutuhan pembangunan Desa di akses atau disalurkan dan dijalankan dengan baik.
 - a. Sangat Setuju
 - b. Setuju
 - c. Kurang Setuju
 - d. Tidak Setuju
 - e. Sangat Tidak Setuju

2. Penggunaan Alokasi Dana Desa yang digunakan untuk pembangunan dipertanggung jawabkan dengan baik oleh perangkat Desa.
 - a. Sangat Setuju
 - b. Setuju
 - c. Kurang Setuju
 - d. Tidak Setuju
 - e. Sangat Tidak Setuju

3. Jalannya pembangunan Desa, sesuai dengan kebutuhan dan program yang telah ditetapkan sebelumnya.
 - a. Sangat Setuju
 - b. Setuju
 - c. Kurang Setuju
 - d. Tidak Setuju
 - e. Sangat Tidak Setuju

✓ **Pengawasan X₃**

1. Penetapan standar yang digunakan oleh kesepakatan bersama antara perangkat Desa Olilit dan warga masyarakat Desa Olilit terkait Pemabangunan yang menjadi patokan untuk penilaian hasil – hasil di jalankan dengan baik.
 - a. Sangat Setuju
 - b. Setuju
 - c. Kurang Setuju
 - d. Tidak Setuju
 - e. Sangat Tidak Setuju

2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa Olilit dilaksanakan dengan baik.

- a. Sangat Setuju d. Tidak Setuju
 b. Setuju e. Sangat Tidak Setuju
 c. Kurang Setuju

3. Pengukuran pelaksanaan kinerja yang berupa pengamatan, dan laporan – laporan tertulis maupun lisan terkait pembangunan Desa yang bersumber dari Dana Desa dilaksanakan dengan baik.

- a. Sangat Setuju d. Tidak Setuju
 b. Setuju e. Sangat Tidak Setuju
 c. Kurang Setuju

4. Perbaikan atas penyimpangan yang terjadi baik dari Penganggaran (Alokasi Dana Desa) ataupun pada proses pembangunan di rencanakan dengan baik sehingga sewaktu – waktu terdapat hasil analisa menunjukkan perlu adanya tindakan koreksi terhadap pelaksanaan pembangunan Desa Olilit maka penyimpangan tersebut dapat diselesaikan dengan baik.

- a. Sangat Setuju d. Tidak Setuju
 b. Setuju e. Sangat Tidak Setuju
 c. Kurang Setuju

✓ **Pembangunan Y :**

1. Dengan adanya bantuan Alokasi Dana Desa yang telah digunakan untuk pembangunan Desa maka Kondisi masyarakat di Desa Olilit dapat terpenuhi dengan baik.

- a. Sangat Setuju d. Tidak Setuju
 b. Setuju e. Sangat Tidak Setuju
 c. Kurang Setuju

2. Partisipasi masyarakat Desa Olilit dalam perencanaan, terhadap anggaran dan proses pembangunan Desa Olilit Sangat mendukung kelancaran pembangunan Desa.

- a. Sangat Setuju
- b. Setuju
- c. Kurang Setuju
- d. Tidak Setuju
- e. Sangat Tidak Setuju

Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian

1. Indikator Perencanaan (X1)

a. Uji Validitas Instrumen Penelitian

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X1.1	5.80	2.677	.602	.852
X1.2	5.53	1.846	.795	.639
X1.3	5.28	1.589	.724	.742

b. Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.825	3

2. Indikator Pelaksanaan (X2)

a. Uji Validitas Instrumen Penelitian

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X2.1	7.45	1.638	.682	.430
X2.2	7.30	1.497	.567	.570
X3.3	6.60	2.144	.365	.795

b. Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.708	3

3. Indikator Pengawasan (X3)

a. Uji Validitas Instrumen Penelitian

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X3.1	9.38	4.343	.741	.848
X3.2	9.38	4.189	.841	.805
X3.3	9.33	3.917	.901	.778
X3.4	8.90	5.836	.512	.921

b. Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.880	4

4. Indikator Keberhasilan Pembangunan (Y)

a. Uji Validitas Instrumen Penelitian

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Y1.1	2.25	.603	.717	.
Y1.2	2.78	1.051	.717	.

b. Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.817	2

Lampiran 4

Distribusi Frekuensi Skor Kuisisioner Penelitian**1. PERENCANAAN (X₁)**

Statistics

		Penetapan maksud dan tujuan	Alternative	Sumber yang diperlukan
N	Valid	40	40	40
	Missing	0	0	0
Mean		2.50	2.78	3.03
Std. Deviation		.599	.800	.947
Minimum		2	1	1
Maximum		4	4	5

Frequency Table

Penetapan maksud dan tujuan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
2	22	55.0	55.0	55.0
3	16	40.0	40.0	95.0
4	2	5.0	5.0	100.0
Total	40	100.0	100.0	

Pilihan Alternative

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
1	1	2.5	2.5	2.5
2	15	37.5	37.5	40.0
3	16	40.0	40.0	80.0
4	8	20.0	20.0	100.0
Total	40	100.0	100.0	

Pengaturan Sumber yang diperlukan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
1	1	2.5	2.5	2.5
2	12	30.0	30.0	32.5
3	14	35.0	35.0	67.5
Valid 4	11	27.5	27.5	95.0
5	2	5.0	5.0	100.0
Total	40	100.0	100.0	

2. PELAKSANAAN (X₂)

Statistics

	Akses	Akuntabilitas	Kesesuaian program dan kebutuhan
N Valid	40	40	40
Missing	0	0	0
Mean	3.23	3.38	4.08
Std. Deviation	.733	.868	.730
Minimum	2	2	2
Maximum	4	5	5

Frequency Table

Akses

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
2	7	17.5	17.5	17.5
3	17	42.5	42.5	60.0
4	16	40.0	40.0	100.0
Total	40	100.0	100.0	

Akuntabilitas

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
2	7	17.5	17.5	17.5
3	14	35.0	35.0	52.5
4	16	40.0	40.0	92.5
5	3	7.5	7.5	100.0
Total	40	100.0	100.0	

Kesesuaian program dan kebutuhan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
2	1	2.5	2.5	2.5
3	6	15.0	15.0	17.5
Valid 4	22	55.0	55.0	72.5
5	11	27.5	27.5	100.0
Total	40	100.0	100.0	

3. PENGAWASAN (X_3)

Statistics

	Penetapan standar	Penentuan pengukuran atau penilaian kerja	Pengukuran pelaksanaan kinerja	Perbaikan atas penyimpangan
N	40	40	40	40
Valid	40	40	40	40
Missing	0	0	0	0
Mean	2.95	2.95	3.00	3.43
Std. Deviation	.876	.846	.877	.636
Minimum	2	1	1	2
Maximum	5	4	4	4

Frequency Table

Penetapan standar

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
2	15	37.5	37.5	37.5
3	13	32.5	32.5	70.0
Valid 4	11	27.5	27.5	97.5
5	1	2.5	2.5	100.0
Total	40	100.0	100.0	

Penentuan pengukuran atau penilaian kerja

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
1	1	2.5	2.5	2.5
2	12	30.0	30.0	32.5
Valid 3	15	37.5	37.5	70.0
4	12	30.0	30.0	100.0
Total	40	100.0	100.0	

Pengukuran pelaksanaan kinerja

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
1	1	2.5	2.5	2.5
2	12	30.0	30.0	32.5
Valid 3	13	32.5	32.5	65.0
4	14	35.0	35.0	100.0
Total	40	100.0	100.0	

Perbaikan atas penyimpangan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
2	3	7.5	7.5	7.5
Valid 3	17	42.5	42.5	50.0
4	20	50.0	50.0	100.0
Total	40	100.0	100.0	

4. KEBERHASILAN PEMBANGUNAN (Y)

Statistics

		Kondisi dan taraf hidup masyarakat	Partisipasi masyarakat
N	Valid	40	40
	Missing	0	0
Mean		2.78	2.25
Std. Deviation		1.025	.776
Minimum		1	1
Maximum		5	4

Frequency Table

Kondisi dan taraf hidup masyarakat

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
1	3	7.5	7.5	7.5
2	16	40.0	40.0	47.5
3	9	22.5	22.5	70.0
4	11	27.5	27.5	97.5
5	1	2.5	2.5	100.0
Total	40	100.0	100.0	

Partisipasi masyarakat

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
1	5	12.5	12.5	12.5
2	23	57.5	57.5	70.0
Valid 3	9	22.5	22.5	92.5
4	3	7.5	7.5	100.0
Total	40	100.0	100.0	

Lampiran 5

Uji Hasil Analisis Reresi Linier Berganda

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.583 ^a	.340	.285	1.413

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	37.085	3	12.362	6.190	.002 ^b
	Residual	71.890	36	1.997		
	Total	108.975	39			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	1.302	1.337		1.074	.037
	X1	.143	.203	.175	.802	.027
	X2	.178	.162	.187	.866	.010
	X3	.299	.164	.500	1.927	.046

a. Dependent Variable: Y

CURICULLUM VITAE

Nama : Yohana Kostansia Luturmase
Nomor Induk Mahasiswa : 15031027
Tempat dan Tanggal Lahir : Olilit, 19 Februari 1998
Alamat : Saumlaki
Pendidikan : SMK

1. SD INPRES Saumlaki Tamatan tahun 2009
2. SMP N 9 Tansel Tamatan tahun 2012
3. SMK N 3 Tansel Tamatan tahun 2015

Karya Ilmiah :

**PENGARUH PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TERHADAP
KEBERHASILAN PEMBANGUNAN DI DESA OLILIT KECAMATAN
TANIMBAR SELATAN KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR**



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
KECAMATAN TANIMBAR SELATAN
KANTOR KEPALA DESA OLILIT**

Jln. Atek Lawanaman , Web, <https://olilitraya.desa.id> Kode Pos. 97664

SURAT KETERANGAN

Nomor : 474.5/462/DO/2019

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini :

Nama : **SEBASTIAN MELSASAIL**
Jabatan : Kepala Desa Olilit
Alamat : Desa Olilit (Olilit Lama RT 09 RW 03)

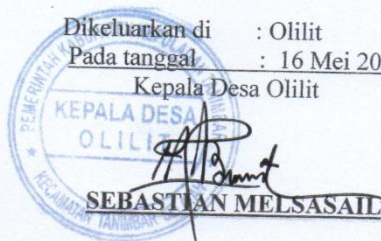
Dengan Ini Menerangkan Bahwa :

Nama : Yohana Costansia Luturmase
Nim : 15031027
Jurusan : Administrasi Publik
Perguruan Tinggi : Universitas Wijaya Putra Surabaya

Telah mengadakan penelitian dengan judul “ PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA PENGARUHNYA TERHADAP PEMBANGUNAN” Mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian pada Kantor Kepala Desa Olilit mulai tanggal 20 April 2019 sampai tanggal 16 Mei 2019 .

Demikian surat keterangan ini di buat untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Olilit
Pada tanggal : 16 Mei 2019
Kepala Desa Olilit



SEBASTIAN MELSASAIL